



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Soekarno Hatta No.153 Kebumen Kode Pos : 54311 Telp.(0287) 381518,
Faksimile (0287) 381989 email dinsosp3a@kebumenkab.go.id
Website : www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025 (%)
1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		Indeks pembangunan gender (IPG)	93,55
		Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100
2	Berkurangnya penduduk miskin		Tingkat kemiskinan	13,50-14,00
		Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM Sosial	100

Kebumen , 2 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dwi Suliyanto
Dwi Suliyanto, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650521 198603 1 011

RENJA 2025

RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN



Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, KP 54311

Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989

Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,

Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah kemudian dapat dijadikan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,


AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen ini.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Rencana kerja tahun 2025 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi Dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga yang pada akhirnya dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



[Handwritten Signature]

WISNUWANTO, S.Sos. Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 19650521 198603 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
Lampiran	vii
BAB I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dengan Capaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat..	46
BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52
3.3 Program dan Kegiatan	55
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	
BAB V. Penutup	
5.1 Catatan Penting	76
5.2 Kaidah Pelaksanaan	77
5.3 Rencana Tindak Lanjut	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 s/d 2026 Kabupaten Kebumen	9
Tabel 2.2	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah	20
Tabel 2.3	Capaian SPM Bidang Sosial tahun 2023 Kabupaten Kebumen	21
Tabel 2.4	Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Sosial (PSKS) Kabupaten Kebumen	22
Tabel 2.5	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen Beserta komponen pembentuknya Tahun 2023	24
Tabel 2.6	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah 2019-2023	25
Tabel 2.7	Persentase Rumah Tangga yang mengalami KDRT Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023	25
Tabel 2.8	Data Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023	26
Tabel 2.9	Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan anak Kabupaten Kebumen 2019-2023	26
Tabel 2.10	Data Korban kekerasan Berbasis Gender dan anak berdasarkan jenis kekerasan di Kabupaten Kebuemen tahun 2019-2023	26
Tabel 2.11	Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023	27
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023	28
Tabel 2.13	Rekapitulasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	29
Tabel 2.14	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025..	37

Tabel 2.15	Usualn program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan (hasil Forum OPD) tahun 2024.....	46
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 beserta target indikator tujuan dan sasaran tahun 2025	50
Tabel 3.2	Keterkaitan prioritas pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2025	52
Tabel 3.3	Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52
Tabel 3.4	Prioritas arah dan tujuan sasaran kebijakan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen	53
Tabel 3.5	Target dan realisasi indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	55
Tabel 3.6	Matrik target dan realisasi Indikator TPB/SDG's	58
Tabel 3.7	Kegiatan yang terkait dengan GULKIN	60
Tabel 3.8	Realisasi dan Target SPM Bidang Sosial	61
Taba 3.9	Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan (IKU OPD)	62
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	24
Grafik 3.1	Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang mendukung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026	56

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3
------------	--	---

LAMPIRAN

Berita Acara Forum PD 2024 Beserta lampirannya

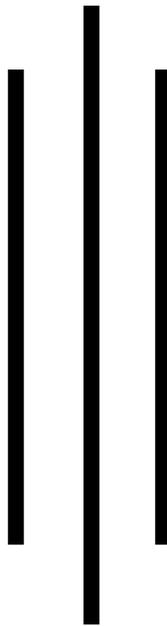
Daftar Hadir Forum PD 2024

Notulen Forum PD 2024

Program dan Kegiatan SIPD 2025



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reja Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kebijakan dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun. Renja OPD memuat kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Renja OPD berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional OPD. Renja OPD memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dalam pembangunan wilayah serta guna tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Undang-undang No 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan penyusunan Renja dimulai dari persiapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, hingga penetapan.

Keterkaitan hubungan antara Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lain seperti Renja K/L, Renja Provinsi, RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen perencanaan yang di atasnya seperti RKPD, Renstra OPD, dan RPJMD. Renja OPD disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

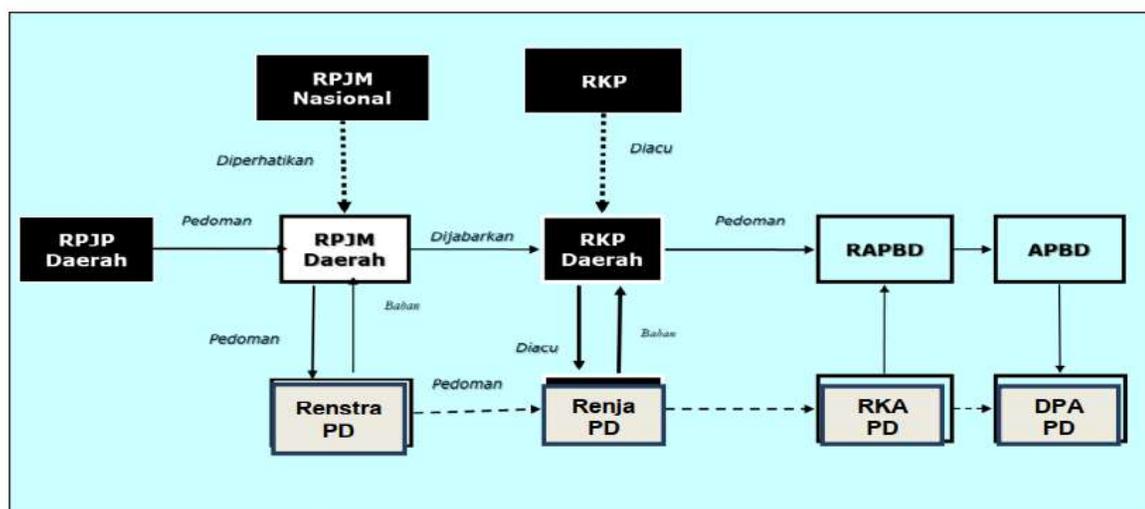
Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 di susun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025, evaluasi indikator kinerja dan pelaksanaan kegiatan menjadi dasar penyusunan prioritas Program kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024.

Hubungan antara Renja tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renja tahun 2025 merupakan penjabaran visi dan misi Renstra tahun 2021-2026 serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026;

2. Renja tahun 2025 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025;
3. Renja tahun 2025 menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Proses penyusunan Renja dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1.1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Bappenas.go.id

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Renstra PD dan RKP Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tetang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
17. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan sosial bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2025, memudahkan seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, memudahkan untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2024, sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2025, dan sebagai acuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bagian ketujuh pasal 129 terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 3.1 Maksud dan Tujuan
- 4.1 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Dinas Sosial,

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Kabupaten
	4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan
BAB V	PENUTUP
	5.1 Catatan Penting
	5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
	5.3 Rencana Tindak Lanjut
	DAFTAR TABEL
	LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 dan capaian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2021-2026 ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023. Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan sumber daya manusia dan bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedangkan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. *Outcome* atau indikator hasil tidak dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat melihat efektifitas kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 tercermin dalam capaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian realisasi indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selengkapnya ada di tabel dibawah ini.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 s/d 2026 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS P3A) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) *	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11	
1				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
1	06	01		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33,18%	33,18%	
1	06	01	2.01	Perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	8 Dokumen	8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	6 Dokumen	0,75%	
1	06	01	2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS P3A) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	9
1	06	01	2.05	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	33 orang	33 orang	50 orang	50 orang	100%	0	0	0
1	06	01	2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
1	06	01	2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
1	06	01	2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
1	06	03		Program pemberdayaan sosial	Persentase peningkatan kemampuan SDM kesejahteraan sosial	73%	69%	70%	70,51%	100,72%	71%	46,47%	65,45%
1	06	02	2.03	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah	3 Kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	4 kegiatan	3 kegiatan	75%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS P3A) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	9
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
					<i>kabupaten/kota</i>								
1	06	03		Program penanganan warga Negara miran tindak kekerasan	Persentase penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
1	06	03	2.01	<i>Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke desa/kelurahan</i>	Jumlah migran yang diberikan fasilitas pemulangan	10 orang	6 orang	10 orang	0	0	3 orang	-	-
1	06	04		Program rehabilitasi sosial	Presentase PMKS di luar panti kewenangan kabupaten yang tertangani	100%	103,96%	100%	104,94%	104,94%	100%	78,84%	78,84%
1	06	04	2.01	<i>Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta</i>	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	8565 orang	1.043 orang	1535 orang	1611 orang	104,95%	2.144 orang	1.843	85,96%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS P3A) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) *	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
				gelandangan pengemis di luar panti									
1	06	04	2.02	Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	4 kegiatan	80%
1	06	05		Program perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan perlindungan jaminan sosial	81,78%	64,93%	77,25%	83,30%	107,83%	78,76%	89,63%	113,80%
1	06	05	2.02	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	26 kecamatan	26 kecamatan	26 kecamatan	26 kecamatan	100%	26 kecamatan	26 kecamatan	100%
1	06	06		Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	56,23%	56,23%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS P3A) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		8 = (7/6)	9
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
					kabupaten/kota								
1	06	06	2.01	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 keg	100%
1	06	06	2.02	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
1	06	07		Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase TMP yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	07	2.01	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Persentase TMP yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08			Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak									
2	08	02		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	19,73%	51,17%	15,63%	51,36%	328,59%	16,99%	15,68%	92,28%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS P3A) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) *	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
2	08	02	2.01	<i>Pelembagaan pengarusatamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota</i>	Jumlah kegiatan pelembagaan pengarusatamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	08	02	2.02	<i>Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota</i>	Jumlah keg. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten /kota	3 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	08	03		<i>Program perlindungan perempuan</i>	Cakupan perlindungan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	03	2.01	<i>Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota</i>	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	08	03	2.02	<i>Penyediaan</i>	Jumlah keg	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS P3A) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) *	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
				layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan							kegiatan	
2	08	04		Proram peningkatan kualitas keluarga	Cakupan program peningkatan kualitas keluarga	19,78%	21%	15,63%	20%	127,96%	16,99%	4,16%	24,48%
2	08	04	2.01	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kab/kota	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	08	05		Prog. Pengelolaan system data gender dan anak	Cakupan prog pengelolaan system data pilah gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0
2	08	05	2.01	Pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian data	Jumlah kegiatan pengumpulan, pengelolaan analisis dan penyajian data	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DINSOS P3A) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (tahun n-1) *	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11
2	08	07	2.01	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkungan daerah kab/kota	Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
2	08	07	2.02	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	Jumlah keg layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	2 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
2	08	07	2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah lembaga layanan untuk anak yang di dukung dengan SDM yang handal dan terlatih	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga

Sumber: Dinsos P3A Kab. Kebumen, 2023

Dari tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa apabila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023, capaiannya cenderung mengalami kenaikan dengan *trend* yang cenderung melebihi target yang ditentukan dalam Renstra tahun 2021-2026.

Rata-rata realisasi capaian program/kegiatan urusan sosial adalah 102,24%. Sementara rata-rata capaian indikator kegiatan adalah 88,11%. Sedangkan capaian program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketahui rata-rata capaian kinerja program adalah 142,75% rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Dari 13 program terdapat beberapa program melebihi dari target yang sudah ditentukan diantaranya:

- Program Program pemberdayaan sosial terealisasi sebesar 70,51% dari target 70%,
- Program Rehabilitasi sosial terealisasi sebesar 104,94% dari target 100%,
- Program perlindungan dan jaminan sosial terealisasi sebesar 83,30% dari target 77,25%,
- Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terealisasi sebesar 51,36% dari target 15,63%,
- Program peningkatan kualitas keluarga terealisasi sebesar 20% dari target 15,63%.

Adapun beberapa faktor penyebab terpenuhinya target program/kegiatan antara lain:

- Adanya Peningkatan kapasitas terhadap Karang Taruna yang dilakukan oleh Kabupaten (Dinsos);
- Adanya kerjasama dan dukungan dari pemerintahan desa terkait kelengkapan data dukung penerima manfaat serta melakukan kerjasama dengan lintas sektoral dan lembaga terkait dan data aduan sesuai dengan data aduan yang masuk atau dilaporkan;
- Karena perubahan data DTKS yang dinamis sehingga jumlah DTKS berubah-ubah setiap periode sedangkan data target yang digunakan adalah DTKS periode 2021;
- Menambahkan jumlah sasaran sosialisasi dan melakukan sosialisasi dengan dengan jumlah sasaran 30 Desa/Kelurahan/Kecamatan sekaligus dalam satu kali pertemuan Pembentukan Pokja BPTKI baru dengan rincian 2 Desa dan 2 Kecamatan;
- Dibentuknya 4 Pokja Bina Keluarga TKI (2 Kecamatan: Karanggayam dan Buayan, 2 Desa: Jatiroto dan Purbowangi) untuk upaya pemenuhan hak-hak TKI, advokasi keluarga TKI, pelatihan-pelatihan keluarga TKI.

Tahun 2023 dari 25 kegiatan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 1 kegiatan yang tidak tercapai sarannya yaitu kegiatan pemulangan warga negara Migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal tidak terealisasi (0%) dari target 10 orang, hal tersebut dikarenakan tidak adanya laporan warga negara migran korban tindak kekerasan. Implikasi yang timbul terhadap capaian kegiatan tersebut adalah terget kegiatan

tidak tercapai, adapun upaya solusinya adalah dengan cara melakukan koordinasi dengan *Migran Care*, TKSK, TAGANA dan masyarakat serta menyiapkan stok bantuan dan anggaran secara optimal.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Indikator kinerja yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal dan IKK

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen. Selengkapnya diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD (%)				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	-	√	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
2	Meningkatnya mutu layanan sosial	-	√	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	
	Bidang Sosial	√										
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	√		100 %	100 %	100 %	100 %	99,93%	100 %	100 %	100 %	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	√		100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	√		100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	√		100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
5	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	√		100%	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

Berdasarkan data yang ada di tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pelayanan perangkat daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar 100% untuk semua indikator IKK dan indikator SPM Sosial.

Hasil capaian SPM sosial tahun 2023 menunjukkan bahwa layanan terhadap rehabilitasi sosial diluar panti telah mencapai 100% untuk semua layanan. Dalam hal penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dimana terdapat empat tahapan yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya, dan pemahaman mengenai penentuan target dan capaian 100% yang belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh *stakeholder* terkait.

Tabel 2.3
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023
Kabupaten Kebumen

Jenis Layanan	Output	Capaian (%)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 783	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 261	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 242	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 118	100
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 895	100

Sumber: Kemendagri, 2023

b. Capaian Kinerja Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Sosial

Data sosial merupakan aspek penting dalam penanganan masalah sosial dan kemiskinan. Pengelolaan data sosial telah diupayakan secara terpadu menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang dimutakhirkan secara periodik dan berkelanjutan. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari 11 orang pada tahun 2019 menjadi 32 orang pada tahun 2022 dan meningkat lagi menjadi 67 orang pada tahun 2023. Dengan bertambahnya jumlah TAGANA ini belum sebanding dengan daerah rawan bencana di Kabupaten Kebumen untuk itu jumlah TAGANA harus di tingkatkan lagi. Jumlah pendamping PKH mengalami penurunan dari 239 orang pada tahun 2021 menjadi 227 pada tahun 2022 dan bertambah lagi ditahun 2023 menjadi 243 orang di sebabkan banyaknya perpindahan petugas PKH dari Kabupaten lain.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tahun 2023 sebanyak 56.841 KPM, tahun 2022 sebanyak 58.778 KPM, dan jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mengalami peningkatan dari 93 pada tahun 2020 menjadi 213 orang pada tahun 2023. Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) berjumlah 26 orang yang ditempatkan di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Kebumen. Satuan Bakti pekerja Sosial (Sakti Peksos) yang merupakan tenaga pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dengan jumlah personil sebanyak 3 orang pada Tahun 2023. Jumlah ini naik lagi dari tahun 2022 sebanyak 2 personil menjadi 3 personil pindahan dari kabupaten lain. Keberadaan PSKS diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen lebih baik.

Profil PSKS di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019-2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Kebumen

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM)	71	93	213	213	213
2	Jumlah Tagana	45	50	37	35	67
3	Jumlah Pnedamping PKH	245	257	239	227	243
4	Jumlah TKSK	26	26	26	26	26

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah Sakti Peksos	3	3	3	2	3

Sumber: Dinsos P3A, 2023

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rehabilitasi dasar diluar panti yaitu penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengarah pada peningkatan keberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya penanganan, rehabilitasi, bantuan hukum hingga pemulangan dan reintegrasi kembali ke masyarakat. Proses pembangunan harus memperhatikan keseimbangan pembangunan berbasis gender, namun kadang kala pembangunan yang dilakukan tidak membawa keberuntungan bagi kaum perempuan. Dalam mengukur kesetaraan gender, terdapat beberapa indeks yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPM merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menjadikan kesetaraan gender sebagai prioritas dalam pembangunan dan dapat dilihat dari penerapan Pengarusutamaan Gender yang didukung oleh semua pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari diraihnya penghargaan Parahita Eka Praya "Nindya" dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sudah menjadikan kewajiban dan kebutuhan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra dan Renja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor

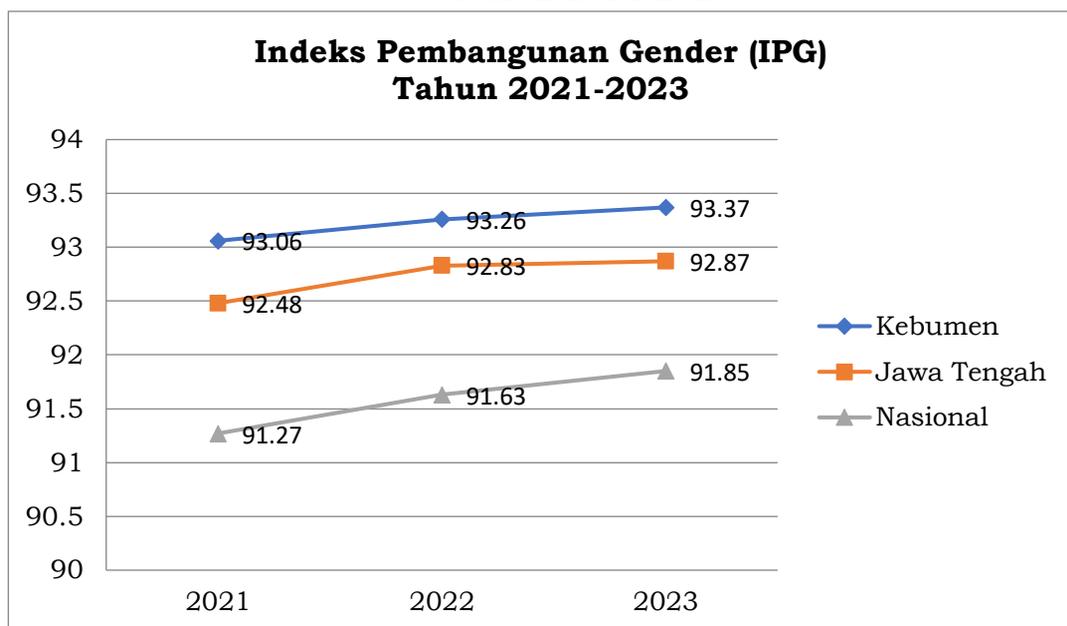
67 Tahun 2011. Perkembangan IPG di Kabupaten Kebumen tersaji dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen
Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2023

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
	2021	2022	2023
Kebumen	93,06	93,26	93,37

Sumber: BPS, 2023

Grafik 2.1
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tahun 2021-2023



Sumber: BPS, 2023

IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Tiga indikator yang digunakan di dalam IDG antara lain keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan. IDG Kabupaten Kebumen sejak tahun 2019 hingga 2022 setiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2023 masih tetap seperti tahun 2022 yaitu 66,78. Dan masih dibawah angka IDG Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kebumen tersaji dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Kebumen dan Jawa Tengah 2019-2023

No	Tahun	Kebumen	Jawa Tengah
1	2019	67,15	72,18
2	2020	66,89	71,73
3	2021	66,86	71,64
4	2022	66,87	73,78
5	2023	66,87	73,78

Sumber: BPS, 2023

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tahun 2022 cenderung menurun dibanding dengan tahun 2019. Pada tahun tahun 2019, kasus KDRT sebanyak 44 kasus, sedangkan pada tahun 2022 terjadi 36 kasus dan tahun 2023 turun menjadi 23 kasus. Peningkatan jumlah kasus KDRT juga terjadi karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT. Persentase rumah tangga yang mengalami KDRT di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019-2023 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.7
Persentase Rumah Tangga yang mengalami KDRT
Kabupaten Kebumen tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah rumah tangga	371.484	371.484	356.220	369.138	469.745
Jumlah rumah tangga yang mengalami KDRT	44	28	39	36	23
Persentase RT yang mengalami KDRT	0,012	0,006	0,011	0,010	0,005

Sumber: P2TP2A 2022

Anak merupakan sebuah tahapan proses perkembangan manusia yang dimulai sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun. Banyak hal mengancam generasi anak-anak mulai dari narkoba, pornografi, kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sementara disisi lain, hak asasi anak belum sepenuhnya diterima seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan perkembangan pertumbuhannya. Perkawinan di usia anak menyebabkan hak-hak anak yang lain menjadi terhambat. Tabel 2.78 menunjukkan bahwa jumlah perkawinan di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan, tahun 2021 dan 2023 menurun.

Tabel 2.8
Data Perkawinan di Bawah Usia 19 tahun Kabupaten Kebumen
Tahun 2019-2023

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2019	20	125	145
2020	40	249	293
2021	43	245	288
2022	21	260	281
2023	43	235	278

Sumber: Pengadilan Agama, 2022

Tabel 2.9
Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
Kabupaten Kebumen 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah korban kekerasan berbasis gender dan anak	135	127	125	89	107
2	Jumlah korban kekerasan terhadap anak	68	84	69	45	52
3	Jumlah korban AKH (anak berkonflik dengan hukum) anak sebagai pelaku	7	11	7	4	14
4	Jumlah korban kekerasan berbasis gender	60	32	49	44	55

Sumber: P2TP2A KARTIKA dan Portal Satu Data Kabupaten Kebumen, 2023

Dari tabel 2.9 Menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan berbasis gender dan anak paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sejumlah 135, jumlah korban kekerasan berbasis gender paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 60 kasus. Sedangkan korban kekerasan anak tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebanyak 84 kasus. Ditahun 2023 jumlah korban kekerasan berbasis gender dan anak mengalami peningkatan sebanyak 107 kasus.

Tabel 2.10
Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
Berdasarkan jenis kekerasan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan fisik	48	19	32	41	47
2	Kekerasan psikis	26	18	24	22	15
3	Kekerasan seksual	50	70	57	60	38
4	Penelantaran	4	9	0	9	7
5	AKH (Anak berkonflik)	7	21	7	10	14

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	dengan hukum)					
	Jumlah korban kekerasan anak	135	127	125	144	121

Sumber: P2TP2A KARTIKA dan Poerta Satu Data Kabupaten Kebumen, 2023

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan berbasis gender dan anak paling tinggi setiap tahunnya adalah jenis kekerasan seksual. Hal ini disebabkan karena pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh dari penggunaan gadget pada anak.

Adapun perkembangan capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	135	112	125	144	121
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS	71	60	61	42	45
3	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	35	26	35	30	30
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	36	26	30	18	20

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
5	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	4	0	0	1	2

Sumber: Dinsos P3A Kabupaten Kebumen, 2023

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu program dan layanan yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat dilihat dari kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat tentang keterlibatan masyarakat dalam program-program yang ada serta umpan balik yang diterima dari masyarakat, adanya kualitas sumber daya manusia dan jumlah tenaga kerja di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk adanya pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada seluruh staf, adanya pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti jumlah penerima bantuan, tingkat keberhasilan program pemberdayaan dan pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, transparansi dan akuntabilitas juga terbuka dalam pelaporan dan penggunaan anggaran serta dapat dipertanggungjawabkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berupaya untuk melakukan inovasi dalam pelayanan dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Untuk informasi yang lebih spesifik bisa dilihat pada laporan kinerja tahunan Dinsos P3A atau dengan cara melakukan survei kepuasan masyarakat.

Berdasarkan tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	target	realisasi
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%
2	Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM sosial	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2023

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada

sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada indikator persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan capaian kinerja pada indikator kinerja persentase capaian SPM Sosial sebesar 100%.

Pelaksanaan urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk Persentase capaian SPM Sosial tahun 2023 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, capaian SPM Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 capaian SPM Sosial sebesar 99,93%. Adapun hambatan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut antara lain berupa tingginya angka PPKS dan adanya calon penerima manfaat yang meninggal, serta kurangnya dukungan lingkungan keluarga.

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 dapat di lihat di bawah ini:

Tabel 2.13
Rekapitulasi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

No	Tahun	Korban kekerasan yang melapor		Korban kekerasan yang tertangani		Capaian (%)	
		Anak	Perempuan	Anak	Perempuan	Anak	Perempuan
1.	2023	66	55	66	55	100	100
2.	2024*	14	11	14	11	100	100

Sumber: Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen, 2023

Keterangan: *) realisasi s.d TW 2 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak terjadi penurunan, walaupun pada tahun 2024 realisasi baru sampai dengan TW 2. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak diibaratkan seperti fenomena gunung es yaitu kasus jumlah kekerasan yang dilaporkan hanya sedikit dari jumlah kasus yang terjadi hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor karena keterbatas pengetahuan, korban malu, takut melapor, takut mencemarkan nama baik, merendahkan martabat keluarga.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, perundungan atau *bullying*, pergaulan bebas, kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh anak yang benar. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi keluarga yang semakin menurun dan komunikasi di dalam keluarga kurang baik.

Upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terus ditingkatkan hingga tingkat desa. Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan secara bersama sama dengan menggerakkan seluruh elemen yang ada dimasyarakat untuk melakukan sosialisasi pembinaan serta penyuluhan.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu PPA sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2022 adalah Penanganan, Perlindungan, Pemulihan Korban yaitu menerima laporan atau penjangkauan korban, memberikan informasi tentang hak korban, memfasilitasi pemberian layanan, pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial, menyediakan layanan hukum, mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi, mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga yang perlu dipenuhi segera, memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas, mengkoordinasikan pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya dan memantau pemenuhan hak korban selama proses acara pengadilan.

Bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, disisi lain kompleksitas urusan perempuan dan anak sangat banyak yang harus diselesaikan oleh Dinas Sosial P3A seperti pada pelayanan berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2022 diatas dan juga antar lain menyusun kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pembinaan penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan fasilitasi pemenuhan hak anak. Oleh karena itu maka wajib di bentuk UPTD PPA pada tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tugas pokok dan peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen serta tantangan saat ini harus diselesaikan.

Permasalahan dan hambatan urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen diantaranya adalah:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani:
 - a. BNBA calon penerima manfaat (PM) Permakanan dan sandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan RTM di usulkan tahun sebelumnya namun pada saat penyeluran tahun berkenaan terdapat PM yang meninggal dunia/pindah domisili;

- b. Terdapat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang muncul mendadak, memerlukan penanganan segera dan belum teranggarkan;
 - c. Banyaknya Pengemis, gelandangan orang terlantar (PGOT) dan ODGJ terlantar sementara di Kebumen masih terbatas dalam melaksanakan pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah
- 2) Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)
 - a. Terdapat basis data penanganan kemiskinan yang berbeda dan harus dikelola Kabupaten yaitu DTKD dan DT Jateng;
 - b. Tidak ada perangkangan/status kesejahteraan/desil di dalam DTKS
 - c. DTKS kurang fleksibel untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA dan tidak dapat di download serta update fitur langsung di aplikasi (tidak selalu di sosialisasikan);
 - 3) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan migran korban tindak kekerasan
 - a. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang resiko dan penanggulangan bencana
 - b. Masih terbatasnya jumlah relawan yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana
 - 4) Masih tingginya angka kekerasan perempuan dan anak serta permohonan dispensasi kawin
 - 5) Belum optimalnya peran Gugus Tugas kota layak anak (KLA);
 - 6) Masih rendahnya sarana komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dalam upaya pencegahan kekerasan perempuan dan anak dan rendahnya peran orang tua dalam tumbuh kembang anak;
 - 7) Rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen dan pengambilan keputusan di birokrasi
 - 8) Belum semua sekolah dan desa menjadi sekolah ramah anak (SRA) dan desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA);
 - 9) Belum terbentuknya UPTD PPA
 - 10) Masih rendahnya jumlah forum anak tingkat desa/kelurahan;
 - 11) Rendahnya kualitas hidup keluarga dan minimnya keterampilan dalam keluarga terutama perempuan.

Dengan adanya berbagai permasalahan diatas tentunya sangat berpengaruh dan berdampak pada tingkat capaian terhadap target Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, dimana apabila Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen hanya mengandalkan sumber dana APBD Kabupaten Kebumen tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Sosial RI, lembaga-lambaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Kebumen, Organisasi Sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat dan lain sebagainya.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
 - a. Anggaran yang tidak terserap karena PM meninggal dunia atau pidah domisili dialihkan pada perubahan APBD bagi PM yang lain
 - b. Mencarikan bantuan dari sumber lain yang bisa diakses secara cepat, seperti: berkoodinasi dengan Sentra Satria Baturaden dan BAZNAS;
 - c. Memaksimalkan SDM dan PSKS yang sudah ada dan menjalin kerjasama dengan pihak terkait, seperti berkoordinasi dengan panti sosial milik Provinsi, Dinas Sosial Kab/Kota lain dan Keluarga PGOT dan ODGJ yang telah diketahui identitasnya.
- 2) Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - a. koordinasi dengan Pusdatin Kesos Kemensos RI dan Dinsos Prov Jateng selaku pengampu Basis data tersebut dan koordinasi Desa/Kelurahan dan Kecamatan selaku pengelola basis data;
 - b. pembaharuan data secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Dinsos P3A sesuai jadwal dari Pusdatin Kesos Kemensos RI;
 - c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pusdatin Kesos selanjutnya pengelola DTKS Kabupaten/kota selalu memantau grup Whatsapp untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pemutakhiran DTKS/Bansos;
- 3) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dan migran korban tindak kekerasan
 - a. Sosialisasi tentang resiko dan penanggulangan bencana, melalui Tagana Masuk Sekolah (TMS) pada PAUD sampai SLTA di kawasan pesisir, longsor dan banjir, Kesiapan logistik dan distribusi logistik ke penyintas.;
 - b. Bimtek Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan anggota Kampung Siaga Bencana (KSB) meliputi pengenalan karakteristik bencana, PPGD (Pertolongan Pertama Gawat Darurat) dan layanan dukungan psikososial dan kelogistikan;
- 4) Melakukan sosialisasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan perkawinan anak melalui media offline maupun online dan mendorong/melibatkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan;
- 5) Optimalisasi Gugus Tugas KLA melalui rapat-rapat koordinasi dan Bimtek bagi Gugus Tugas KLA
- 6) Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan menghadirkan narasumber (expert) tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak tentang peran orang tua dalam tumbuh kembang anak;

- 7) Mendorong terpenuhinya kuota perempuan di parlemen dan pengambil keputusan di birokrasi;
- 8) Meningkatkan sekolah di semua tingkatan menjadi sekolah ramah anak (SRA) dan desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA)
- 9) Membentuk UPTD PPA
- 10) Pembentukan Forum Anak tingkat desa di Kabupaten Kebumen
- 11) Peningkatan produktifitas ekonomi perempuan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dan mengurangi beban biaya hidup keluarga.

Sebagai upaya mendorong Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran, tugas dan fungsinya dan sasaran yang telah di tetapkan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen harus mempunyai strategi pencapaiannya yang mengacu pada tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah. Sebagai berikut:

a. Tantangan

Tantangan dalam penyelenggaraan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kebumen yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1) Bidang Sosial

- a) Tingginya populasi PPKS yang disebabkan tingginya angka kemiskinan;
- b) Kompleksitas permasalahan PPKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan;
- c) Tingginya intensitas perpindahan PSKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan mendapatkan PPKS jalanan;
- d) Rendahnya kemandirian dan produktifitas penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- e) Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, sarana prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan;
- f) Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- g) Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
- b) Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk disiplin dan memilih calon legislative perempuan;

- c) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam penguatan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d) Pemahaman dan komitmen para pembuat kebijakan mengenai pentingnya integrasi perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- e) Kelompok kerja PUG di Kabupaten/Kota belum optimal;
- f) Kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- g) Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsive anak di Kabupaten/Kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- h) Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- i) Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
- j) Pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- k) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

b. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan kinerjanya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Mengamanatkan Bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat dan Dunia Usaha;
- b. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Mengamanatkan Bahwa Penanganan Permasalahan Kemiskinan Menjadi Tanggung Jawab Instansi Sosial Secara Berjenjang Dari Pusat Hingga Kabupaten/Kota;
- c. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- d. Banyaknya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penguatan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- f. Tersedianya pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsive gender;

- g. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- h. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
- i. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota layak anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- j. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pengembangan tingkat Kecamatan dan Desa;
- k. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
- l. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- m. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- n. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- o. Adanya kerjasama dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
- p. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- q. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Beberapa isu-isu penting yang di hadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebagai tugas dan fungsinya adalah:

1. Penghapusan kemiskinan ekstrem
Dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS terlantar di prioritaskan pada penanganan di luar panti sesuai SPM yang di tetapkan
2. Pemberdayaan kaum disabilitas
Di kabupaten Kebumen terdapat kurang lebih 7.041 jiwa penyandang disabilitas yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Serta masih mengalami diskriminasi dan hambatan mobilitas dan sulit mendapatkan pekerjaan.
3. Besarnya potensi bencana di kabupaten kebumen

Wilayah Kabupaten Kebumen rentan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, tanah longsor, putingbeliung dan kekeringan

4. Pengelolaan data DTKS menuju validitas data
Pengelolaan data DTKS menuju validasi data ini melalui tahapan perbaikan meliputi updating data (perbaikan NIK, warga sudah meninggal dan pindah alamat)
5. Menguatnya isu kesetaraan gender
Implementasi keadilan dan kesetaraan geder masih rendah begitu juga dengan pemahaman kesetaraan gender yang masih parsial di masyarakat sehingga berdampak pada implementasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dan ketahanan keluarga. Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDG's. Masih adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat untuk mempercepat kesetaraan gender diberbagai sektor pembangunan harus diupayakan bersama.

Isu strategis yang di hadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai dampak langsung terhadap upaya penurunan angka kemiskinan, jadi apabila tidak segera diatasi permasalahan tersebut akan sangat menghambat kinerja dan pencapaian Visi dan Misi, karena pada hakikatnya proses pencapaian target-target pembangunan diawali dengan perencanaan yang baik.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen juga berkeyakinan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut:

1. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati kebumen terhadap penanganan permasalahan sosial dan permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai salah satu Misi dari Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 dan penanganan PPKS dan pengentasan kemiskinan ekstrim merupakan salah satu prioritas daerah;
2. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen terhadap penanggulangan permasalahan sosial di Kabupaten Kebumen yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kabupaten kebumen;
3. Dukungan dari *stakeholders* (dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi sosial, dll) terkait penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat begitu tinggi, hanya belum terkoordinir dengan baik;
4. Trend alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari APBD Kabupaten Kebumen yang terus meningkat setiap tahunnya.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang ada untuk setiap satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program dan Kegiatan tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kebumen

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKPD Tahun 2024, Program Strategis Nasional, dan Pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjalankan 13 program dengan 23 kegiatan dan 58 sub kegiatan.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Perangkat Daerah: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
1	Program Pemberdayaan Sosial	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	72%	273.421.000	Program Pemberdayaan Sosial	Kab. Kebumen	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	72%	188.372.000	
1)	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	4 kegiatan	273.421.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	4 kegiatan	188.372.000	
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kab. Kebumen	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	10.000.000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kab. Kebumen	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarisasi Di Daerah Kabupaten/Kota Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal	100%	5.000.000	
2)	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kebumen	Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	10 orang	10.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kab. Kebumen	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	5 orang	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Kab. Kebumen	Prosentase Jumlah Pmks Terlantar Yang Tertangani	100%	4.918.963.10	Program Rehabilitasi Sosial	Kab. Kebumen	Prosentase Jumlah Pmks Terlantar Yang Tertangani	100%	4.695.171,010	
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kebumen	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	2306 orang	4.309.161.860	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kab. Kebumen	Jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	2306 orang	4.187.897,860	SPM Sosial
4)	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	5 kegiatan	609.801.150	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	5 kegiatan	507.273.150	Spm Sosial
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kab. Kebumen	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	80,27%	4.058.460.860	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Kab. Kebumen	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	80,27%	4.007.196,860	
5)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Sosialisasi Bantuan Sosial	26 kecamatan	4.058.460.860	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Sosialisasi Bantuan Sosial	26 kecamatan	4.007.196.860	
5	Program Penanganan Bencana	Kab. Kebumen	Prosentase korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat	100%	711.978.720	Program Penanganan Bencana	Kab. Kebumen	Prosentase korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat	100%	671.103.860	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
			Bencana Daerah Kabupaten/Kota					Bencana Daerah Kabupaten/Kota			
6)	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	5 kegiatan	592.732.290	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Kebum en	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	5 kegiatan	571.857,430	SPM Sosial
7)	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Kebumen	Jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	2 kegiatan	119.246.430	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Kebum en	Jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	2 kegiatan	99.246,430	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Kebumen	Prosentase TMP Yang Di Kelola	100%	66.700.430	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Kebum en	Prosentase Tmp Yang Di Kelola	100%	41.068,430	
8)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Prosentase TMP Yang Di Kelola	100%	66.700.430	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Kebum en	Prosentase TMP Yang Di Kelola	100%	41.068,430	
7	Program Pengarutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Kebumen	Cakupan Pengarutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	18,38%	541.385.000	Program Pengarutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kab. Kebum en	Cakupan Pengarutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	18,38%	471.385.000	
9)	Kegiatan Pelembagaan Pengarutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Pelembagaan Pengarutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kegiatan	71.385.000	Kegiatan Pelembagaan Pengarutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebum en	Jumlah Kegiatan Pelembagaan Pengarutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kegiatan	71.385.000	
10)	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang	2 kegiatan	470.00.000	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang	Kab. Kebum en	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang	2 kegiatan	400.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Organisasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/ Kegiatan/ Organisasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
	Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
8	Program Perlindungan Perempuan	Kab. Kebumen	Cakupan Perlindungan Perempuan	100%	93.756.430	Program Perlindungan Perempuan	Kab. Kebumen	Cakupan Perlindungan Perempuan	100%	93.756,430	
11)	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	46.475.000	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	46.475.000	
12)	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	2 kegiatan	47.281.430	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	2 kegiatan	47.281,430	
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Kebumen	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18,36%	14.636.000	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Kab. Kebumen	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	18,36%	14.363.000	
13)	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	2 kegiatan	14.636.000	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	2 kegiatan	14.636.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kab. Kebumen	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100%	33.047.430	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kab. Kebum en	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100%	7.415.430	
14)	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	33.047.430	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kebum en	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	7.415.430	
11	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kab. Kebumen	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA	353.945.000	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kab. Kebum en	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA	353.945.000	
15)	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kegiatan	148.795.000	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Kebum en	Jumlah Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kegiatan	148.795.000	
16)	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	Kab. Kebumen	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	3 kegiatan	205.150.000	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Kab. Kebum en	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	3 kegiatan	205.150.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
	Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
12	Program Perlindungan Khusus Anak	Kab. Kebumen	Cakupan Perlindungan Anak	100%	57.278.430	Program Perlindungan Khusus Anak	Kab. Kebumen	Cakupan Perlindungan Anak	100%	31.646.430	
18)	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 kegiatan	57.278.430	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kebumen	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 kegiatan	31.646.430	
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Keumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.909.953.282	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kebumen	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4.729.349.142	
20)	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	8 dokumen	146.016.860	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	8 dokumen	113.572,720	
21)	administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.721.698.702	administrasi keuangan perangkat daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.670.434.702	
22)	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas Sosial P3A	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	52 orang	126.468.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dinas sosial P3A	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	52 orang	80.836.000	
23)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum	12 bulan	194.542.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum	12 bulan	194.542.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program/ Kegiatan/	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	
			Perangkat Daerah					Perangkat Daerah			
24)	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dinas sosial p3a	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	6 unit	154.901.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	6 unit	154.901.000	
25)	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	412.720.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Sosial P3a	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	217.876.720	
26)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97 unit	155.606.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial P3a	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97 unit	297.186.000	
JUMLAH					16.043.525.592	JUMLAH					15.310.045.592

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2024

Dari tabel 2.14 diatas dapat disimpulkan bahwa Rancangan awal RKPD tahun 2025 sebesar Rp. 15.310.045.592,- terdiri dari urusan bidang sosial sebesar Rp. 14.337.261.302 dan urusan bidang P3A sebesar Rp. 972.784.290,-. Anggaran terbesar yaitu untuk urusan penunjang Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4.729.349.142,- anggaran ini digunakan untuk anggaran rutin di Sekretariat dalam mendukung semua kegiatan disamping penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan jaringannya, Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 188.372.000,- yang diperuntukkan untuk peningkatan kemampuan SDM kesejahteraan sosial seperti TKSK, Karang Taruna, LK3 dan Anggota Puskesmas, Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan sebesar Rp. 5.000.000,- diperuntukkan untuk memfasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan, program Rehabilitasi sosial sebesar Rp 4.695.171.010,- anggaran ini salah satunya untuk mendukung pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial), program perlindungan dan jaminan sosial sebesar Rp. 4.007.196.860,- diperuntukkan untuk pembinaan, pengawasan SDM PKH dan peningkatan kompetensi SDM PKH serta bantuan DBHCHT untuk buruh pabrik rokok. Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 671.103.860,- diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat bencana, pelatihan dan pembinaan kepada Taruna Siaga Bencana serta pembentukan Kampung Siaga Bencana. Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 41.068.430,- diperuntukkan untuk pemeliharaan dan pengamanan TMP. Sedangkan urusan P3A terdiri dari program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 471.385.000,- yang diperuntukkan untuk koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan PUG, kegiatan advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan. Program perlindungan perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 93.756.430,- diperuntukkan untuk layanan rujukan bagi korban tindak kekerasan, program peningkatan kualitas keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 14.636.000,- diperuntukkan untuk kegiatan pembentukan Pokja Bina Keluarga TKI untuk upaya pemenuhan hak-hak TKI, advokasi keluarga TKI, pelatihan-pelatihan keluarga TKI, Program pengelolaan sistem data gender dan anak dengan anggaran sebesar Rp. 7.415.430,- diperuntukkan untuk pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebesar Rp. 353.945.000,- diperuntukkan untuk mendukung pengembangan Kabupaten layak anak dan pembentukan forum anak. Program Perlindungan Khusus anak dengan anggaran sebesar Rp. 31.646.430,- di peruntukkan untuk pendampingan kasus, pelayanan pengaduan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal di rancangan awal Renja Perangkat Daerah ditargetkan sebanyak 10 orang, sedangkan pada hasil analisis

kebutuhan ditargetkan sebanyak 5 orang hal ini dikarenakan menyesuaikan anggaran yang ada.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah di diskusikan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tujuannya adalah melakukan penyelarasan rumusan rancangan Renja dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan. Dalam Forum OPD yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Usulan dari masyarakat ini diperoleh melalui proses pelaksanaan musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen.

Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran serta berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dilaksanakan, hal ini menyebabkan mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan Kesejahteraan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari masyarakat untuk Tahun 2025.

Tabel 2.15

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan (hasil Forum OPD) Tahun 2024

No	Usulan	Catatan
1	Kegiatan Bina TKI menjadi case yang perlu di perhatikan karena masih banyak tenaga migran dan bina TKI di Kabupaten Kebumen untuk lebih diperhatikan lagi	Masukan dari Saiful Anas (Migran Care Kebumen)
2	Forum anak diharapkan semakin di libatkan di 91 desa dilokasi prioritas dan semakin banyak sosialisasi untuk forum anak di Kabupaten Kebumen	Masukan dari Akbar (Forum Anak)
3	Diharapkan adanya sosialiasi untuk kegiatan sosial masyarakat dan validasi kemiskinan untuk penerima bantuan sosial	Masukan PSM Sruweng

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2024

Berdasarkan Tabel 2.15 penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat disampaikan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan penyampaian usulan pada saat Forum OPD 2024 yang terdiri

dari hasil Musrenbang Desa/Kecamatan/Kabupaten dan usulan Pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil dari penjangkaran aspirasi masyarakat merupakan salah satu masukan yang penting dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berpedoman pada Rencana Kera Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Renja PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan daerah tahun 2023, keberlanjutan terhadap peencanaan pembangunan daerah tahun 2024, difokuskan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 yaitu Peningkatan Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter” dengan prioritas daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
5. Mendasar pada hal tersebut diatas selanjutnya arah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu terkait dengan tuisi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan tahun ke lima dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021-2026 guna mendukung Prioritas ke 2 yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata

Berpedoman dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah arah kebijakan merupakan pedoman yang ditetapkan dalam melakukan setiap aktivitas dan kegiatan yang akan dilakukan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arh kebijakan yang diambil adalah Peningkatan dan optimalisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan khususnya di sektor-sektor strategis, Peningkatan upaya perlindungan kepada perempuan dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap perempuan, Peningkatan upaya perlindungan anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas pada upaya preventif tindakan kekerasan terhadap anak, penguatan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Visi daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”*. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mengacu pada 2 Misi yaitu Misi ke-2 *“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya”* dan Misi ke-3 *“Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan”*.

Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran jangka menengah. Adapun keterkaitan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 beserta target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 beserta target Indikator Tujuan dan sasaran tahun 2025

Misi			Tujuan	Indikator tujuan	Satuan	Target tahun 2025		Sasaran	Indikator sasaran	satuan	Target tahun 2025
Misi 2	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	2	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia	Indeks	72,45	6	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender	Indeks	93,55
Misi 3	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan	4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan pendapatan (ukuran bank dunia)	%	20,98-21,48	11	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	%	13,50-14,00

Misi			Tujuan	Indikator tujuan	Satuan	Target tahun 2025		Sasaran	Indikator sasaran	satuan	Target tahun 2025
	ekonomi kerakyatan										

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

Tabel 3.2

Keterkaitan prioritas pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2025 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Prioritas 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Prioritas 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Prioritas 1 Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial
Prioritas 3 Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat		

Sumber: RKPD, 2025

Keterkaitan prioritas pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2025 dengan prioritas Kabupaten Kebumen, mendukung prioritas ke dua yaitu Peningkatan kualitas SDM dan prioritas ke tiga yaitu Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi Misi Bupati, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mempunyai strategi dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan sosial sebagaimana tabel berikut:

Adapun tujuan dan sasaran yang dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah:

Tabel 3.3

Tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Misi		Tujuan		Sasaran	
	Misi		Tujuan		Sasaran	
1	Misi 2:	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Tujuan 2.1	Meningkatnya perlindungan perlindungan perempuan dan anak	Sasaran 2.1.3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
2	Misi 3:	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui potensi sumber daya alam,	Tujuan 3.2	Berkurangnya penduduk miskin	Sasaran 3.2.1	Meningkatnya mutu layanan sosial

No	Misi		Tujuan		Sasaran	
	Misi		Tujuan		Sasaran	
		pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan				

Sumber: RPJMD, 2023

Prioritas arah tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.4

Prioritas arah tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

No	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator	Target kinerja tujuan/sasaran					
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Misi 2:	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya						
	Tujuan 2.1	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	93,25%	93,35%	93,45%	93,55%	93,65%
	Sasaran 2.1.3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	14,26%	15,63%	16,99%	18,35%	19,72%
		Program perlindungan perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi	Cakupan perlindungan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Program peningkatan kualitas keluarga	cakupan program peningkatan kualitas keluarga	14,26%	15,63%	16,99%	18,35%	19,72%
		Program pengelolaan system data gender dan anak	Cakupan program pengelolaan system data pilah gender dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
		Program pemenuhan hak anak	Kategori kabupaten layak anak	madya	madya	madya	madya	madya

No	Tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator	Target kinerja tujuan/sasaran					
			2022	2023	2024	2025	2026	
	(PHA)	(KLA)						
	Program perlindungan khusus anak	Cakupan perlindungan anak	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Misi 3:	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal						
	Tujuan 3.2	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00	13,00-13,50
	Sasaran 3.2.1	Meningkatnya mutu layanan sosial	Persentase capaian SPM Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kot a	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Program pemberdayaan sosial	Persentase peningkatan kemampuan SDM Kesos	69%	70%	71%	72%	73%
		Program penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan	Persentase penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Program rehabilitasi sosial	Persentase PMKS di luar panti kewenangan kabupaten yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
		Program perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan perlindungan jaminan sosial	75,75%	77,25%	78,76%	80,27%	81,78%
		Program penanganan bencana	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase TMP yang di kelola	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: RPJMD 2023

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdiri dari tujuan dan sasaran. Adapun tujuan yang berkaitan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Dengan sasaran meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan indikator persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target dari 2021-2026 adalah 100%. Sedangkan tujuan untuk urusan sosial adalah berkurangnya penduduk miskin dengan indikator tujuannya tingkat kemiskinan, dan sasarannya adalah meningkatnya mutu layanan sosial dengan indikator sasarannya adalah persentase capaian SPM sosial dengan target dari tahun 2021-2026 adalah 100%.

3.3 Program Dan Kegiatan

Guna mewujudkan visi pembangunan dan menjawab tantangan serta dalam mengatasi permasalahan dalam pembangunan sosial (pengentasan kemiskinan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal maupun indikator kinerja Kabupaten dan Perangkat Daerah) maka program dan kegiatan tersebut disusun kedalam program-program pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas perangkat daerah.

1. Beberapa faktor yang menjadi bahan rumusan program dan kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah berdasarkan Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berisi Indikator Utama (IKU) Daerah dan penilaian keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah nantinya dapat dilihat dari pencapaian dari target-target tersebut. Target IKU daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

No	IKU Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target 2025
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	%	93,37	93,45	93,55
2	Tingkat kemiskinan	%	16,34	14,00-15,00	13,50-14,00

Sumber: RKPD, 2024

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta

menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka

Grafik 3.1

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang mendukung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD kabupaten kebumen 2021-2026



Sumber: Dinsos P3A, 2023

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,65%. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 sedikit banyak berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada kurun waktu tersebut meningkat sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian pasca turunnya kasus Covid-19 pada tahun 2022, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang tergambar dari penurunan angka kemiskinan sebesar 1,42%. Capaian ini sudah sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 yaitu sebesar 16,00-17,00%. Berdasarkan sumber dari katalog data dan informasi kemiskinan Kabupaten/Kota di Indonesia, BPS, 2022 penurunan angka kemiskinan di tahun 2021-2022 sebesar 1,42%. Pada tahun 2023, berdasarkan data dari BPS angka kemiskinan mencapai 16,34%. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penggulungan kemiskinan.

b. Pencapaian SDGs.

SDGs adalah singkatan dari *Sustainable Development Programs* atau yang bisa kita artikan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara singkat, SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Semua Target dan tujuan TPB/SDGs terbagi menjadi empat pilar, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengampu pilar Pembangunan sosial dengan tujuan mengakhiri segala bentuk kemiskinan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Tabel 3.6
Matrik Target dan Realisasi Indikator TPB/SDG's

Kode Indikator	INDIKATOR KAB/KOTA	SATUAN	2023		2024	2025	2026	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Target	Target		
									(20)
	TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN								
	Target 1.1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari								
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim	%	PM	2,49					Disagregasi : nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
1.3.1 (c)	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas/ penyandang disabilitas miskin.	%	100	100	100	100	100		Disagregasi : Nasional
1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan	KPM	52.324	52.324	47.092	42.383	38.144		Disagregasi : nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
	Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana								
1.5.1 (e)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Org	pm	150	pm	pm	pm		Disagregasi : Nasional
	TUJUAN 5: MENCAPAI KESETERAAN GENDER DAN MEMPERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN								
	5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dokumen Responsif gender	2	2	1	1	1		Disagregasi : nasional, provinsi, kabupaten/kota
	5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi								

Kode Indikator	INDIKATOR KAB/KOTA	SATUAN	2023		2024	2025	2026	Upaya Pemecahan Masalah	Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Target	Target		
									(20)
	lainnya.								
5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	kasus	PM	29	PM	PM	PM		Disagregasi : Nasional, Provinsi
5.2.2 (a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	100			Disagregasi : Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota
	5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	%	23	na	22	21	20	kabupaten tidak menghitung	Disagregasi : Nasional, Provinsi, Kabupaten/kota --> data tahun 2022 oleh BPS belum terbit
	TUJUAN 16: PERDAMIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh								
	Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.								
16.2.1. (b)	Jumlah korban kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan	Orang	20	25	7	6	5		Disagregasi : nasional, provinsi

Sumber: Data SDG's 2023

c. Pengentasan Kemiskinan

Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kebumen adalah dengan adanya kegiatan yang berkaitan dengan GULKIN pada tahun 2024. Seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Kegiatan yang terkait dengan GULKIN

No	Kegiatan	Sasaran	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Penyediaan permakanaan (disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng, RTM dan Program Rantang Kasih untuk lansia terlantar)	1.534 orang (disabilitas terlantar 50 orang, anak terlantar 100 orang, lanjut usia terlantar 100 orang, gelandangan dan pengemis 20 orang, Rumah tangga miskin 250 orang, dan Rantang kasih 1.014 orang)	2.120 orang (disabilitas terlantar 50 orang, anak terlantar 100 orang, lanjut usia terlantar 100 orang, gelandangan dan pengemis 20 orang, Rumah tangga miskin 250 orang, dan Rantang kasih 600 orang, permakanaan untuk desa prioritas 1.000 orang)
2	Penyediaan sandang	270 orang (disabilitas terlantar 50 orang, anak terlantar 100 orang, lanjut usia terlantar 100 orang, gelandangan pengemis 100 orang)	270 orang (disabilitas terlantar 50 orang, anak terlantar 100 orang, lanjut usia terlantar 100 orang, gelandangan pengemis 100 orang)
3	Penyediaan alat bantu	100 orang disabilitas	62 orang disabilitas
4	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	140 orang penyandang cacat berat	120 orang penyandang cacat berat
5	Pemberian layanan kedaruratan (orang kehabisan bekal)	50 orang	50 orang
6	Pemberian layanan data dan pengaduan	50 orang	50 orang
7	Penyediaan permakanaan (WRSE dan ODGJ)	100 orang ODGJ Rusi Dosaraso dan 40 WRSE	100 orang ODGJ Rusi Dosaraso dan 40 WRSE

No	Kegiatan	Sasaran	
		Tahun 2024	Tahun 2025
8	Penyediaan sandang (Rusi Dosaraso)	100 orang ODGJ Rusi Dosaraso	100 orang ODGJ Rusi Dosaraso
9	Penyediaan makanan (permakanan bencana)	500 orang korban bencana alam dan sosial	480 orang korban bencana alam dan sosial
10	Penyediaan sandang	115 orang korban bencana alam dan sosial	130 orang korban bencana alam dan sosial

Sumber: Dinas Sosial P3A, 2024

Kegiatan yang terkait dengan GULKIN adalah pemberian bantuan berupa penyediaan permakanan untuk (penyandang disabilitas, anak, lansia, gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti sosial, Rumah tangga miskin dan pemberian Rantang Kasih untuk lanjut usia terlantar), penyediaan sandang, penyediaan alat bantu untuk disabilitas, bantuan keuangan untuk penyandang cacat berat, bansos penyediaan permakanan untuk Wanita Rawan sosial ekonomi (WRSE) dan untuk ODGJ di Rumah Singgah Dosaraso. Penyediaan sandang untuk ODGJ Rumah Singgah Dosaraso. Penyediaan makanan, dan sandang untuk korban bencana alam dan sosial.

d. Pencapaian SPM

Tabel 3.8
Realisasi dan Target SPM bidang Sosial

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Target
			2023	2024 *TW 2	2025
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	%	100	70.26	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	%	100	85.04	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	100	84.82	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	100	50.48	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	%	100	55.56	100

No	Indikator	Satuan	Realisasi		Target
			2023	2024 *TW 2	2025
	bencana bagi korban bencana kabupaten/kota				

Sumber: SPM Bangda, 2024,

Keterangan: *) Realisasi TW 2

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa target SPM ditahun 2023 adalah 100% untuk semua indikator SPM. Dengan capaian semua SPM 100%.

e. Pencapaian IKU Perangkat Daerah (IKU OPD)

Tabel 3.9

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan (IKU OPD)

No	Urusan	Indikator	Satuan	Realisasi 2023	Target	
					2024	2025
1	Sosial	Persentase capaian SPM Sosial	%	100	100	100
2	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100

Sumber: RKPD, 2023

Dinas Sosial P3A mempunyai 2 IKU OPD pada tahun 2023 yaitu pada urusan Sosial dengan indikator Persentase capaian SPM Sosial dengan target 100% dan realiasi sebesar 100%, sedangkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak indikator persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target 100% tercapai 100%. Target pada tahun 2024 dan 2025 untuk Persentase capaian SPM Sosial dan Persentase Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebesar 100%.

f. Inovasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

1) Pengembangan Puskesmas SLRT “RUMAH HARAPAN”

Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis daerah Kabupaten Kebumen yang akan menjadi mainstreaming dalam penyusunan perencanaan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan. Pada level penanganan kemiskinan mikro masih terdapat kasus masyarakat miskin yang belum menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif dan banyak yang belum menerima manfaat dari

program penanggulangan pemerintah meskipun kondisinya layak menerima. Pada September 2015 telah diluncurkan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) "RUMAH HARAPAN" Kabupaten Kebumen dengan payung hukum Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2015. Saat itu memberikan 4 jenis layanan bagi warga miskin yaitu pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi serta data dan pelaporan.

Saat ini Rumah Harapan telah berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagai pusat informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, membangun wadah aduan masyarakat tentang program bantuan sosial, mengetahui kepesertaan dan kebutuhan program melalui penjangkauan oleh fasilitator dilapangan dan menjadi pusat penanganan keluhan dan rujukan, menghubungkan masyarakat miskin dengan multi layanan dan lintas sektoral sesuai dengan kebutuhan. Saat ini PUSKESOS memiliki 10 jenis layanan yaitu (1) Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), (2) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), (3) Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (4) Rekomendasi Pelayanan Jamkesda, (5) Konsultasi Bantuan Sosial, PKH, dan Sembako, (6) Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, Disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, dan gepeng, (9) Rekomendasi perpanjangan dan pendirian LKS, (10) Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA).

Puskesmas berfungsi sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan yang akan dirujuk ke berbagai pengelola program yang berwenang dan dipastikan dapat ditangani dengan baik dan terpantau proses penanganannya. Salah satu strategi perluasan dan keberlanjutan PUSKESOS antara lain dengan advokasi dan sosialisasi pada seluruh *Stakeholder*, menyusun rencana aksi pengembangan Puskesmas SLRT, dan membangun pentahelix partisipasi sektor non pemerintah seperti yang sudah dilakukan selama ini yaitu berkolaborasi dengan: Perguruan Tinggi, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, BUMN, dan perangkat daerah lainnya. Saat ini Puskesmas Rumah Harapan telah dikembangkan di 130 puskesmas di tingkat desa.

Pada Tahun 2022 Rumah Harapan ditetapkan sebagai program *Quick Win Smart City* Kabupaten Kebumen. Selain itu Puskesmas merupakan salah satu inisiatif dalam penanggulangan kemiskinan. Keberadaan Puskesmas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi, saling terkoneksi dengan seluruh pemangku kepentingan, membantu validasi data penerima bansos dan adanya

puskesmas pada tingkat desa dapat mendekatkan layanan kesejahteraan sosial dengan masyarakat.

2) MAS WISNU (Masyarakat Adil Sejahtera melalui Wisuda dan Nambah Usaha)

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program perlindungan sosial dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan melalui pemberian bantuan secara bersyarat. Kriteria penerima PKH dibedakan berdasarkan komponen yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriterianya masing-masing. Sebagai contoh komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD, SMP, SMA atau yang sederajat.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 03/3/BS.02.01/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020 arah kebijakan Program PKH bukan lagi sekedar memastikan bantuan tepat sasaran, utamanya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan KPM PKH yang graduasi, bukan hanya karena tidak memenuhi syarat kepesertaan, namun KPM PKH juga bisa berdaya. Indikator keberhasilan dari PKH adalah meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi KPM PKH. Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) pada bulan Januari 2023 terdapat 59.892 penerima PKH. Dari jumlah tersebut terdapat penerima dengan masa kepesertaan lebih dari 5 tahun. Apabila mengacu Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020 penerima dengan kepesertaan lebih dari 5 tahun sudah harus masuk dalam bidik graduasi. Bidik graduasi adalah proses mempersiapkan KPM untuk dapat keluar dari kepesertaan dari program PKH. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum terwujud dengan optimal.

Atas dasar tersebut Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen berusaha mendorong agar KPM PKH termotivasi untuk mandiri sehingga tidak selamanya bergantung pada bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat lainnya yang membutuhkan agar dapat memperoleh bantuan. Hal ini dilaksanakan melalui program MAS WISNU “Masyarakat Adil Sejahtera Melalui Wisuda dan Nambah Usaha”.

3) LESUNG EMAS

“LESUNG EMAS” diluncurkan pada Januari 2023. Inovasi ini merupakan hasil replikasi dari “LESUNG PIPI DOSARASO” (2017). LESUNG PIPI DOSARASO merupakan inovasi yang berhasil lenyapkan pasung dengan penemuan advokasi pendirian panti rehabilitasi DOSARASO yaitu dengan mendirikan Rumah Singgah Dosaraso dengan menyediakan tempat layanan yang representatif di dalamnya memberikan pemberdayaan serta pemertabatan dengan metode pembinaan berupa bimbingan, terapi kejiwaan, dan pemberdayaan ekonomi produktif agar eks ODGJ dapat kembali bersatu ditengah-tengah keluarga. Kategori inovasi pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan. “LESUNG EMAS” mendukung tujuan tegaknya Hak Asasi Manusia pada ODGJ yang berada di Kabupaten Kebumen dan lepasnya praktek pemasungan yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan data dari SIKS-DJ tahun 2022, Kabupaten Kebumen memiliki 7.205 jiwa yang mengalami disabilitas, baik disabilitas fisik, sensorik maupun motorik. Terdapat 967 jiwa yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas mental gangguan jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan dari total 31.081 penduduk di Kabupaten Kebumen. Masih banyak keluarga yang percaya terhadap pengobatan alternatif dengan menggunakan cara pasung pada penderita ODGJ. Pada dasarnya pemberian pasung pada penderita ODGJ termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, namun masih banyak yang percaya bahwa dengan memasung maka penderita ODGJ dapat menjadi pulih dan stabil dengan mengirimkan ke Padepokan Wali Siri Mbah Marsiyo.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut maka Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen melaksanakan replikasi inovasi LESUNG PIPI menjadi “LESUNG EMAS” yaitu **L**enyapkan **pa**SUNG **m**Ewujudkan **M**asyarakat **A**man dan **S**ehat di Padepokan Wali Siri Mbah Marsiyo. “LESUNG EMAS” bertujuan untuk melepaskan penderita ODGJ secara bertahap yang masih terpasung di Padepokan Wali Siri Mbah Marsiyo yang masih ilegal. Kemudian menjadikan Padepokan Wali Siri menjadi sebuah Panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial yang legal dengan mengupayakan badan hukum serta tanpa menggunakan pasung dan mengutamakan kesehatan penerima manfaat.

4) KAK DISKA (KONSULTASI KAWIN DAN DISPENSASI KAWIN)

Data angka dispensasi kawin meningkat tajam yaitu 200% dikarenakan kenaikan batas umur menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun serta faktor kemiskinan dan pendidikan. Beberapa alasan mengajukan Dispensasi Kawin yaitu calon pengantin perempuan sudah hamil, Anak takut

terjerumus hubungan seksual, takut melanggar norma agama, anak sudah berhubungan suami istri, calon pengantin laki-laki dan perempuan saling mencintai serta takut melanggar norma sosial.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 12 bahwa wajib memberikan nasihat kepada calon pengantin yang mengajukan dispensasi kawin dengan menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan calon pengantin yaitu (1) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (2) keberlanjutan anak dalam menempuh wajar dikdas 12 tahun, (3) belum siapnya organ reproduksi anak, (4) dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak, (5) potensi perselisihan yang mengakibatkan KDRT.

Sehubungan dengan hal tersebut dilaksanakan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Kebumen dengan Dinsos P3A Kabupaten Kebumen serta RSUD dr. Soedirman Kebumen untuk memberikan layanan konseling terhadap calon pengantin atau pemohon Dispensasi Kawin (KAK DISKA).

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

a. Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 mencakup 2 urusan, 13 Program, 23 kegiatan, dan 57 sub kegiatan. Total pagu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah Rp 15.310.045.592,-.

Kegiatan yang bersifat bantuan sosial terfokus di kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza diluar panti sosial, kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota, dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota.

b. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Penyebaran lokasi yang ada di program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2025 tersebar di wilayah Kabupaten Kebumen. Pemberian bantuan sosial berupa penyediaan permakanaan rencana akan didistribusikan di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Ambal, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Puring. Pemberian bantuan sosial permakanaan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) rencana akan didistribusikan Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Ambal, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Puring.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan (pokok-pokok pikiran DPRD) untuk di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen untuk sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi berlokasi di Kabupaten Kebumen dengan peruntukan peningkatan kapasitas SDM Perempuan.

c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 15.310.045.592,-. dengan rincian Gaji ASN Rp. 2.053.929.592,-, Tukin Rp. 1.568.529.000,-, DBHCHT Rp. 3.860.562.000,-, Belanja Operasional Rp. 4.737.280.000,-, Upah P2K Rp 52.264.000,-, Belanja Prioritas Rp. 25.000.000,-, Belanja Kebijakan Daerah Rp. 3.012.481.000,-. dan pagu ranwal RKPD 2025 sebesar Rp. 15.310.045.592,-. Rancangan program/kegiatan pada Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 sesuai dengan Rancangan Awal RKPD karena sudah disesuaikan dengan kebutuhan.

d. Penjelasan rumusan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Pada tahun 2025 rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD tahun 2025, sedangkan untuk pagu indikatif terdapat perbedaan yaitu di rancangan awal RKPD pagu indikator sebanyak Rp 16.043.535.592,- sedangkan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sebesar Rp 15.310.045.592,- itu disebabkan karena adanya penyesuaian target di beberapa sub kegiatan yang mengakibatkan anggaran juga di sesuaikan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Program adalah penjabaran kegiatan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut sub kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah maupun untuk penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai kewenangan, yang terdiri dari 2 urusan, 13 program, 23 kegiatan dan 57 sub kegiatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia prioritas yang telah disertai dengan kebutuhan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai dengan kebutuhan pendanaan pagu indikatif selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksanaan dari program perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 disajikan pada lampiran. Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan arah kebijakan tahun 2024 dalam RPJMD yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif. Untuk mencapai sasaran tersebut, program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 adalah

pencapaian indikator SPM, pemenuhan kebutuhan dasar bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis di luar panti dan korban bencana alam/sosial serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen akan dilaksanakan berbagai Program/Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Table 4.1
Rencana Kerja Dan Pendanaan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Rencana Pogram dan Kegiatan Prioritas daerah tahun anggaran 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							15.868.170.000
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.729.349.142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.104.209.000
1	06	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	8 dokumen	113.572.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 dokumen	155.258.000
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12 bulan	3.670.434.702	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	3.907.783.000
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	52 orang	80.836.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 orang	90.791.000
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bulan penyediaan administrasi umum PD	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12 bulan	194.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	252.896.000
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	6 unit	154.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 unit	118.041.000
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12 bulan	217.876.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	282.493.000
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan,	97 unit	297.186.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 unit	296.947.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Daerah	urusan pemerintahan daerah	Semua Kel/Des						
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	persentase peningkatan sdm kesejahteraan sosial		72%	188.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		73%	525.108.000
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	4 kegiatan	188.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 kegiatan	525.108.000
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	jumlah migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	10 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 orang	20.000.000
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	presentase PMKS di luar panti kewenangan kabupaten yang tertangani		100%	4.695.171.010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SPM Sosial	100%	3.417.503.000
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2306 orang	4.187.897.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SPM Sosial	1.950 orang	2.512.116.000
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	jumlah kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	5 kegiatan	507.273.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 kegiatan	905.387.000
1	06	05			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial		80,27%	4.007.196.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		81,78%	4.670.060.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026		
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi bantuan sosial	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	26 kecamatan	4.007.196.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 kecamatan	4.670.060.000
1	06	06			Program Penanganan Bencana	prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota		100%	671.103.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SPM Sosial	100%	2.061.255.000
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan perlindungan sosial morban bencana alam dan sosial kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	5 kegiatan	571.857.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SPM Sosial	5 kegiatan	1.582.710.000
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	99.246.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	478.545.000
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	persentase TMP yang dikelola		100%	41.068.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	70.035.000
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	presentase tmp yang di kelola	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	100%	41.068.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	70.035.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				972.784.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.005.141.000
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				972.784.290				1.005.141.000
2	08	02			Program Pangarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pangarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		18,38%	471.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19.73%	253.029.000
2	08	02	2,01		Pelebagaan Pangarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	jumlah keg pelembagaan pangarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/koyta	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3 kegiatan	71.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	74.954.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kabupaten/Kota								
2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	178.075.000
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	cakupan perlindungan perempuan		100%	93.756.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	274.300.000
2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	46.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	48.798.000
2	08	03	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	47.281.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	225.502.000
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	cakupan program peningkatan kualitas keluarga		18,36%	14.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19,72%	15.367.000
2	08	04	2,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	14.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	15.367.000
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan program peningkatan kualitas keluarga		100%	7.415.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	33.915.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	05	2,01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen pengumpulan, pengelohan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1 dokumen	7.415.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	33.915.000
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)		madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA	353.945.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA	371.115.000
2	08	06	2,01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelembagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3 kegiatan	148.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	151.551.000
2	08	06	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3 kegiatan	205.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	219.564.000
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak		100%	31.646.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	57.415.000
2	08	07	2,02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1 kegiatan	31.646.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	57.415.000
Total									15.310.045.592				16.873.311.000

Sumber: SIPD-RI Kemendagri, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum target capaian Renja tahun 2025 dan prakiraan maju 2026 relatif sama, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan yang sifatnya rutin. Sedangkan apabila dilihat dari sisi kebutuhan dana, rata-rata kebutuhannya diasumsikan mengalami kenaikan. Dan selanjutnya jika dilihat dari sumber dana, maka Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber utama pendanaan di Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen 2025 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Rencana kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksud sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PSKS, terikat akan dokumen perencanaan ini. Dengan rencana kerja ini di harapkan pula dapat mendorong partisipasi dalam pengelolaan kesejahteraan sosial

5.2 Kaidah pelaksanaan

Rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 merupakan tahun ke 4 (empat) dari periode Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021-2026. Kaidah pelaksanaan Renja sebagai berikut:

1. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

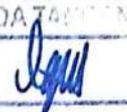
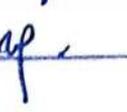
Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan memperhatikan masukan dari hasil musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan dan kinerja pelaksanaan kegiatan organisasi perangkat daerah tahun sebelumnya. Dengan demikian, penyusunan rencana kerja organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi prioritas pembanguann Kecamatan dengan rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Semoga rencana kerja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tahun 2025.

Kebumen, 11 JUL 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen


Dwi Subianto, S.Sos, M.Si
Kepala Dinas Utama Muda - IV/c
NIP. 19650521 198603 1 011

TELAH DIVERIFIKASI OLEH TIM BAKELAA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setyawan	
Calyo M.	

LAMPIRAN

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311

Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,

Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,

Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

Kebumen, 15 Februari 2024

Nomor : 005 / 121
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Undangan

Yth 1. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
2. Kepala Kepolisian Resor Kebumen
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
4. Terlampir
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
waktu : Pukul 09.00 s.d selesai
tempat : Aula Dinsos P3A (Lantai 2) Jln. Soekarno Hatta No.153 Kebumen
acara : Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
keterangan : 1. Mohon berkenan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen memberikan sambutan dan penyampaian pokok pikiran DPRD;
2. Mohon berkenan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen memberikan sambutan dan penyampaian kebijakan Pemerintah daerah dalam Prioritas Pembangunan tahun 2025;
3. Kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk menjadi Narasumber.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Dwi Suliyanto, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505211986031011

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
2.	Kepala Kepolisian Resor Kebumen
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kebumen
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
11.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
12.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Kepala Dinas Tenaga Kerja
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
15.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kebumen
16.	Camat Gombang
17.	Camat Karangsembung
18.	Camat Kebumen
19.	Camat Mirit
20.	Camat Prembun
21.	Camat Puring
22.	Direktur UPT RSUD dr. Soedirman
23.	Direktur UPT RSUD Prembun
24.	Kepala Puskesmas Karanganyar
25.	Kepala Puskesmas Mirit
26.	Kepala Puskesmas Pejagoan
27.	BPJS Kebumen
28.	Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kebumen
29.	Kepala Kementrian Agama kabupaten Kebumen
30.	Ketua DWP Kabupaten
31.	Ketua GOW Kabupaten
32.	Ketua TP PKK Kabupaten
33.	Korkab PKH
34.	LSM FORMASI

35.	LSM MIGRAN CARE
36.	Aisyiyah Kebumen
37.	TKSK
38.	KOPRI (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri)
39.	PSGA (Pusat Study Gender dan Anak) IAINU
40.	Karang Taruna Kabupaten
41.	TAGANA
42.	KSB (Kampung Siaga Bencana)
43.	PORDAM (Pelopor Perdamaian)
44.	PERTUNI
45.	Panti Aisyiyah Kebumen
46.	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)
47.	BAZNAS Kabupaten Kebumen
48.	Rektor Universitas Putra Bangsa
49.	Rektor Universitas Muhammadiyah Gombong
50.	Ketua Forum Anak Kabupaten
51.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen
53.	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen
54.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen
55.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen
56.	Pekerja Sosial Ahli Muda Subkoordinator Jaminan Sosial Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen
57.	Pekerja Sosial Ahli Muda Subkoordinator Perlindungan Sosial Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen
58.	Pekerja Sosial Ahli Muda Subkoordinator Penanganan Kemiskinan Sosial P3A Kab. Kebumen
59.	Pekerja Sosial Ahli muda Subkoordinator Rehabilitasi Sosial anak terlantar dan lanjut usia terlantar Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen
60.	Kasubbag Keuangan Dinas Sosial Kab. Kebumen
61.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Kebumen
62.	Bendahara Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen
63.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 153 Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381518, Faksimile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

Kebumen, 19 Februari 2024

Nomor : 005 / 146
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Undangan

Yth 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen
di
Tempat

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

hari/tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
waktu : Pukul 09.00 s.d selesai
tempat : Aula Dinsos P3A (Lantai 2) Jln. Soekarno Hatta No.153 Kebumen
acara : Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dalam
rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
keterangan : Mohon berkenan memberikan sambutan dan penyampaian kebijakan Pemerintah
Daerah dalam Prioritas Pembangunan tahun 2025

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Dwi Suliyanto, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505211986031011

TEMBUSAN :

1. Bupati Kebumen;



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Soekarno Hatta No.153 Kebumen 54311,
Telepon (0287) 381518, Faximile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Selasa tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu dua puluh empat, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen yang dihadiri Pemangku Kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dwi Suliyanto, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024

Jam : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Aula Lantai 2 Dinsos P3A Kabupaten Kebumen

Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

MENYEPAKATI

- KESATU** : Program dan Kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselarskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- KEDUA** : Menyepakati Berita Acara ini beserta Lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen;
- KETIGA** : Berita Acara ini beserta Lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPDP Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 20 Februari 2024

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kebumen



Dwi Suliyanto, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 196505211986031011

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Yunita Prasetyani, S.E, MA, McDev	BAPPEDA	BAPPEDA	
2.	Endra Wijayanto, S.E	BPKPD	BPKPD	
3.	Hartono	BAZNAS	BAZNAS	
4.	Saiful Anas	LSM/ Ormas	Migran Care	
5.	Fauriyah Noor	GOW Kab. Kebumen	GOW Kab. Kebumen	

DELEGASI OPD DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

NO.	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Fauriyah Noor	GOW Kab. Kebumen	GOW Kab. Kebumen	



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Soekarno Hatta No.153 Kebumen 54311,
Telepon (0287) 381518, Faximile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id, Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kabupaten : Kebumen
Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
Waktu : Pukul 09.00 s.d selesai
Acara : Forum Perangkat Daerah Dinsos P3A 2024
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Dinsos P3A

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT/NOMOR TELP	TANDA TANGAN
1	Budi Heston	PPy. 'Aisyiyah	R. Pemuda 106 KEG	1
2	Fauziah Nur	GOV	Klingong	2
3	Bandiyo	POL PP	Panjaj	3
4	Misparni H	Dinsos	Dinsos	4
5	Sri Rahayu	--	--	5
6	Khusni P.	--	--	6
7	Fitimah	Legislatif		7
8	Hartono	BAZNAS		8
9	Aenah	KOPRI Kebumen	Kebumen	9
10	Budi Yudianto	TA GANA	Kebumen	10
11	Sri Hartoh.	Kec. Grogol	Kec. Grogol	11
12	Sujatmiko	Kec. Purbun	Kec. Purbun	12
13	Fitri S. Pujiati	INSYIRAH	Pulgoz	13
14	ESTININGSIH	PKIC KAS.	BATIMULYO ALINDA	14
15	Sena Rahayu	Dinsos P3A	Soeto 143	15
16	Dodi	Pertuni	Pertuni	16
17	Tjagung	Ky. KESRA		17
18	Hengren	DF	Soeto 153	18
19	Kusmiyati		Klingong	19
20	Yogi	DISTRIBUKOR	KGB	20

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NOMOR TELP	TANDA TANGAN
21	Titi Syarifatul K.	Dinas P3A		21
22	Wahran Emy W	Pusk. Karanganyar		22
23	Abrar Atha Bism	Forum Anak		23
24	SI SURUMEN	ITPA		24
25	Anini Schiyoni	PKM Pejagan		25
26	SYALPEL ARTUR	Migrant Care	08139722274	26
27	Yuddy KUSTIAN	KPS Kebumen	08129473 0981	27
28	Ratna Wijayanti	Distapang	08160414688	28
29	Tutut Tyas	Puskemas Mirit	08773287544	29
30	Iin Lalah	Kapita		30
31	Aurina W H.	Kec	082227640015	31
32	Naman F	Kec Puring		32
33	Hari	Polres	0811579007	33
34	Ning Iwah	Unimus	0851360274077	34
35	Dwi W	DLHUP		35
36	Indra Bus S.	Disdukcapil	085795073060	36
37	Xenia P	Buppeds	087278097757	37
38	Diana R	Kec. Kr. Sambung	081328880345	38
39	Sutiyono	PA. Kebumen	0819883885	39
40	AHMADI			40
41	Budi N	PRM	08529160323441	41
42	Endra W	BPKPD	081328766441	42
43	W. WIDODO	KEC. MURIT	08521592708	43
44	FRANS HANDE AT 2		08000529773	44
45	Suparno	Dinas. PPKB	082134636732	45

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NOMOR TELP	TANDA TANGAN
46	Eti Rochanas	formasi	0821 3811 7709	46
47	W.G.H.S.	K.T.	085227841140	47
48	Boedis	Kesop	085629077	48
49	Agus F	PKH	085725946286	49
50	Linda M-C	Dinas Pst.	085726388733	50
51	Agustina	Dinas P3A	081591384100	51
52	Juwati	Dinas P3A	08153538627252	52
53	Nur-p	-	08112632124	53
54	Carawan	Dinas P3A	081811057100	54
55	Eko Hadi P	Dinas P3A	08225282752	55
56	Eko Prayogo	Dinas P3A	0811112908	56
57	Ummah	Dinas P3A		57
58	Mahinda S.	Dinas P3A	0895701600911	58
59	Siti Nurthayati	Dinas P3A		59
60	Bulegani	Staf		60
61	Heri W	Dinas P3A		61
62	Winarni	Staf		62
63	Rusmanib	PKH		63
64	Sinaras	PKH		64
65	Ladik	Dinas P3A		65
66	Dada	Dinas P3A		66
67	Aghisna w-w	PKH		67
68	Ani R	Dinas		68
69	Agil Prigamboro	P2k		69
70	Punti Khomsiyah	Staf		70

NO	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	ALAMAT DAN NOMOR TELP	TANDA TANGAN
71	Ilmu Arum I.	Dinsos P3A	082137873010	71
72	Agus S	Dinsos P3A		72
73	MARLINA	Dinsos P3A		73
74	Darang.	Dinsos P3A		74
75	Sekar Arum	Dinsos P3A	-	75
76	Anahy Suiant	Dinsos P3A		76
77	Wwin M	Dinsos P3A	-	77
78	Heri N	Dinsos P3A		78
79	RIZKY PW	Inspektorat		79
80	Dwi Suliyanto	kadinas		80
81	Febri Vian	PKH		81
82	maria ngakun	PKH		82
83	Cumarta	Kantor		83
84	Esti P	PKH Pasuruan		84
85	Lupeno	PKH Pajajaran		85
86	Adi Purwanbo	PKH Pancowarno		86
87	muri k.	Korlab.		87
88	Siti Nurragani	PKH Klirong		88
89	Vita Kurnia	delegasi kec semar		89
90	Ajeng Ok	delegasi kec klu		90
91	Arum DL	Krb. Limpeg		91
92	ALVIN R	delegasi kec ktu		92
93	Munir	P2k		93
94	Fuad	Sakti Pektos		94
95	Sano	Sakti Pektos		95
96	Yusuf HR	Sakti Pektos		96
97	M. Fajar	P2k		97
98	Arti Wiji			98
99	Lies Dewi	BKPSDM		99
100	Wuri	Perkim LH		100



**TATA TERTIB FORUM PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL P3A
TAHUN 2024**

1. Peserta forum hadir 5 menit sebelum forum dimulai;
2. Sebelum forum berlangsung telah dilakukan registrasi seluruh peserta forum;
3. Jika ada peserta forum yang terlambat datang, forum akan tetap dilanjutkan tanpa mengulangi agenda forum tersebut;
4. Sejak pelaksanaan forum dimulai peserta untuk dapat menggunakan alat komunikasi secara bijak sehingga tidak mengganggu pelaksanaan forum;
5. Seluruh proses sidang pleno akan diarahkan oleh seorang moderator dan seluruh peserta berkewajiban mematuhi arahan moderator;
6. Pendapat/ pertanyaan dapat disampaikan oleh peserta kepada narasumber pada saat sesi diskusi yang dipimpin oleh moderator;
7. Jika ingin mengungkapkan pendapat/ pertanyaan, peserta untuk dapat mengangkat tangan terlebih dahulu agar mendapat kesempatan berpendapat/ bertanya yang ditentukan oleh moderator;
8. Pendapat /pertanyaan yang disampaikan harus sesuai dengan agenda yang dibicarakan sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman;
9. Di akhir sidang pleno, dilakukan penyepakatan pemilihan delegasi forum perangkat daerah Dinas Sosial P3A pada Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 serta penyepakatan dan penandatanganan berita acara hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
10. Peserta yang ditunjuk sebagai delegasi forum untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik pada saat Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024;
11. Wakil peserta yang ditunjuk untuk dapat menandatangani berita acara hasil forum sesuai arahan moderator dan panitia Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3A Kabupaten Kebumen Tahun 2024, serta
12. Peraturan yang belum tertulis akan ditambahkan jika diperlukan.

**SUSUNAN ACARA
FORUM PERANGKAT DAERAH
DINSOS P3A KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024
SELASA, 20 FEBRUARI 2024**

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 - 08.35	Pembukaan	MC
08.35 - 08.40	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars kabupaten kebumen	Panitia
08.40 - 08.45	Pembacaan Doa	Petugas
08.45 - 09.00	Laporan Penyelenggara	Sekretaris Dinsos P3A Kebumen
09.00 - 12.00	Pleno Pelaksanaan Forum PD	Moderator
	1. Pembacaan dan Penyepakatan Tata Tertib	Moderator
	2. Paparan 1: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kebumen)
	3. Sambutan dan Penyampaian: Penyampaian Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kebumen	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen
	4. Paparan 2: Rancangan Renja PD Dinsos P3A Tahun 2025	Kepala Dinsos P3A Kabupaten Kebumen
	5. Pembahasan/ Diskusi Tanya Jawan dan Kesepakatan:	
	a. Tanggapan/ masukan dari Peserta	Peserta
	b. Tanggapan/ masukan dari Narasumber	1. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen 2. Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen
12.00 - 12.10	Pemilihan Delegasi PD Dinas Sosial P3A yang selanjutnya mengikuti Musrenbang	MC (pemilihan delegasi oleh Kepala DINSOS P3A)
12.10 - 12.20	Penandatanganan Berita Acara Forum PD Bappeda	Kepala DINSOS P3A dan Delegasi
12.20 - 12.30	Penutupan	MC/Panitia



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Soekarno Hatta No.153 Kebumen 54311,
Telepon (0287) 381518, Faximile (0287) 381989,
Laman www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id,
Pos-el dinsosp3a@kebumenkab.go.id

NOTULEN

- Rapat : Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Hari/tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
- Surat undangan : Nomor 005/121
- Waktu rapat : Pukul 09.00 - selesai
- Acara : Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen Tahun 2024 dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Pimpinan rapat : Kepala Dinas Sosial P3A
- Pencatat : P2K
- Peserta rapat : 1. Ketua DPRD Kab. Kebumen
2. Kepala Kepolisian Resor Kebumen
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Kebumen
4. Inspektur Daerah Kab. Kebumen
5.

Kegiatan rapat :
Rapat Forum Perangkat Daerah Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 09.00- Selesai.

Forum ini di hadiri oleh tamu undangan sebanyak 100 orang, yang terdiri dari perwakilan OPD, perwakilan Kecamatan, LSM/Ormas, unsur lembaga yang bemitra dengan Dinsos P3A. Adapun pembahasan Forum Dinsos P3A sebagai berikut:

Pembahasan :

- a. Pembukaan oleh MC
- b. Acara inti forum perangkat daerah dinsos P3A Tahun 2023 dengan moderator Ibu Arum Dwi Lestari, S.Kep, M.M, selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinsos P3A .
- c. Pembacaan tata tertib Forum OPD oleh Moderator
- d. Paparan materi dan tanggapa narasumber
 - a. Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekda Kabupaten Kebumen (Fras Haidar, M.PA)

Perencanaan yang baik dapat membuat hasil akhir yang baik. Diharapkan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya antara paparan, dan masukan pada saat forum harus dikawal untuk di tindak lanjuti di Musrenbang di akhir bulan Maret 2024.

Walaupun tetap menjadi Kabupaten termiskin, kita tetap perlu bahagia karena kita mempunyai banyak kekayaan alam yang melimpah di wilayah Kabupaten Kebumen. Dinas Sosial P3A sebagai salah satu OPD yang berperan penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan.

b. Kepala dinas sosial p3a

Materi forum perangkat daerah dinsos p3a 2024 dalam rangka penyusunan renja PD tahun 2025 memuat tentang yang pertama adalah evaluasi kinerja tahun 2023 diantaranya kinerja keuangan kegiatan di tahun 2023 dengan capaian sebesar 96,20% (deviasi 3,8%), capaian kinerja fisik kegiatan 2023 sebesar 100%. Adanya deviasi dikarenakan penyerapan pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak maksimal karena adanya subkoor/JF dan staf yang purna tugas dan sampai sekarang belum terisi (subkoor 5 orang, dan staf pensiun 1 orang). Capaian IKU OPD Tahun 2023 diantaranya ada prosentase capaian SPM sosial dengan target dan realisasi sebesar 100%, persentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan target dan realisasi sebesar 100%. Rencana kerja di tahun 2025 terdiri dari 2 urusan, 13 program, 24 kegiatan, dan 58 sub kegiatan. Pagu indikaf tahun 2025 sebanyak Rp 12.205.300.592,- dengan rincian belanja prioritas OPD Rp 25.000.000,-, belanja operasional Rp 4.697.280.000,-, Gaji PNS Rp 2.053.929.592,-, Tukin PNS Rp 1.568.529.000,-, DBHCHT Rp 3.860.562.000,-. (materi terlampir). Pada tahun 2025 diharapkan menjadi Indonesia Emas yang dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 0%.

c. BAPPEDA (Yunita Prasetyani, S.E, MA, McDev)

Penyampaian materi yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas BAPPEDA Kab. Kebumen adalah mengenai arah kebijakan pembangunan kabupaten keumen tahun 2025 dengan tema peningkatan sektor pertanian, industri dan jasa melalui pemantapan kualitas pelayanan publik dan kulaitas sumber daya manusia dengan inovasi sebagai pengentasan kemiskinan.

Kabupaten kebumen mempunyai 91 desa lokasi prioritas pembangunan, diharapkan Dinsos P3A dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan di tahun 2025 di 91 desa tersebut. Selain memperbaiki konsumsi perlu juga memperbaiki pola konsumsi. Perlunya kalori, protein yang seimbang.

Pembangunan SDM diantaranya di prioritaskan pada penurunan stunting, pembinaan karakter, kurikulum ekstrakurikuler tentang life skill dan soft skill, pengembangan anak putus sekolah, beasiswa pendidikan, pelatihan tenaga kerja dan vokasi, peningkatan kapasitas

SDM sektoral sesuai kebutuhan dan dukungan engambangan pendidikan tinggi.

Dinsos P3A di harapkan perlu adanya diskusi dengan BAPPEDA sehingga perlu menentukan kegiatan prioritas untuk kegiatan di tahun 2025.

d. BPKP (Endra Wijayanto, S.E)

Salah satu kegiatan pendapatan adalah dengan pajak. Pada tahun 2024 ini diharapkan kinerja keuangan di Dinas Sosial P3A lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Rincian RKA tahun 2025 agar segera disiapkan muali dari sekarang, untuk belanja pengadaan barang dan jasa agar lebih diperhatikan lagi seperti contohnya listrik (pembayaran listrik bulanan). Untuk diperhatikan lagi sumber-sumber pendanaannya.

e. Inspektorat Daerah Kab. Kebumen

Pada materi selanjutnya agar Dinas Sosial P3A mencantumkan Visi Misi Bupati Kebumen menurut RPJMD. Pelaporan kinerja untuk indikator kinerja utama OPD diharapkan bisa di perinci. Dan Rekomendasi terkait reuiu Inspektorat untuk dapat di tindak lanjuti.

e. Saran dan masukan

a. Saiful Anas (Migran Care Kebumen)

- Pada anggaran Migran /TPPO hanya 10 juta, sangat disayangkan tidak terpakai padahal banyak kegiatan yang belum tercover oleh APBD
- Persoalan TPPO sudah terkait dengan Polri secara nasional apakah di kebumen sudah di ranah Polri atau hanya di Dinas Sosial P3A;
- Kegiatan bina keluarga TKI menjadi case yang perlu di perhatikan karena masih banyak tenaga migran;
- Bina keluarga TKI di kabupaten kebumen untuk lebih di tingkatkan lagi,
- Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten terbesar pengirim pekerja migran menjadi no 25 di nasional.

b. Baznas Kebumen (Hartono)

- Diharapkan Dinas Sosial P3A menjadi institusi yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat
- Survey kemiskinan apakah valid karena menjadi kultur kemiskinan
- Diharapkan kita semua semua dapat memahami zakat dan sodaqoh

c. Forum Anak (Akbar)

- Forum anak diharapkan semakin di libatkan di 91 desa lokasi prioritas,
- Dan semakin banyak sosialisasi untuk forum anak di kabupaten kebumen

d. PSM Sruweng

- Diharapkan adanya sosialisasi untuk kegiatan sosial masyarakat
- Validasi kemiskinan untuk penerima bantuan sosial

- f. Delegasi Forum PD Dinsos P3A di wakili oleh ibu Fauriyah Noor dari unsur GOW Kab. Kebumen yang akan menjadi perwakilan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di acara Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2024. Adapun berita acara forum OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wakili oleh Ibu Yunita Prasetyani, S.E, MA, McDev (BAPPEDA), Endra Wijayanto, S.E (BPKPD), Hartono (BAZNAS), Siful Anas (LSM/ORMAS MIGRAN CARE), dan Fauriyah Noor (Unsur lembaga GOW Kabupaten Kebumen).
- g. Kesimpulan
Hasil Forum PD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen di setujui dan dapat diterima oleh peserta. Saran dan masukan akan di tundaklanjuti untuk kesempurnaan Renja tahun 2025.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



DWI SULIYANTO
DWI SULIYANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19650521 198603 1 011

**SUSUNAN ACARA
FORUM PERANGKAT DAERAH
DINSOS P3A KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024
SELASA, 20 FEBRUARI 2024**

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 - 08.35	Pembukaan	MC
08.35 - 08.40	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars kabupaten kebumen	Panitia
08.40 - 08.45	Pembacaan Doa	Petugas
08.45 - 09.00	Laporan Penyelenggara	Sekretaris Dinsos P3A Kebumen
09.00 – 12.00	Pleno Pelaksanaan Forum PD	Moderator
	1. Pembacaan dan Penyepakatan Tata Tertib	Moderator
	2. Paparan 1: Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Prioritas Pembangunan Tahun 2025	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kebumen)
	3. Sambutan dan Penyampaian: Penyampaian Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kebumen	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen
	4. Paparan 2: Rancangan Renja PD Dinsos P3A Tahun 2025	Kepala Dinsos P3A Kabupaten Kebumen
	5. Pembahasan/ Diskusi Tanya Jawan dan Kesepakatan:	
	a. Tanggapan/ masukan dari Peserta	Peserta
	b. Tanggapan/ masukan dari Narasumber	1. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen 2. Kepala BPKPD Kabupaten Kebumen 3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen
12.00 - 12.10	Pemilihan Delegasi PD Dinas Sosial P3A yang selanjutnya mengikuti Musrenbang	MC (pemilihan delegasi oleh Kepala DINSOS P3A)
12.10 - 12.20	Penandatanganan Berita Acara Forum PD Bappeda	Kepala DINSOS P3A dan Delegasi
12.20 - 12.30	Penutupan	MC/Panitia

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KEBUMEN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						12.205.300.592,00							16.734.625.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.462.516.302,00							15.729.484.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						11.462.516.302,00							15.729.484.000,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	4.653.680.282,00						-	5.001.619.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</i>	-			8 Dokumen	94.752.860,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinsos P3A, OPD, LSM	-	126.791.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	64.752.860,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas 3. Peningka tan kesejah teraan ekonomi masyarakat	ASN Dinsos P3A, OPD, LSM		93.350.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas 3. Peningka tan kesejah teraan ekonomi masyarakat	ASN Dinsos P3A, OPD, LSM		33.441.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	-			12 bulan	3.670.434.702,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A	-	3.887.487.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	3.622.458.592,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		3.803.581.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				8 Dokumen	47.976.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		83.906.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	-			50 Orang	86.468.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A	-	90.791.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	9.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		9.851.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		52.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	27.542.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		28.919.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		3.675.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>				4 Paket	38.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		39.045.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				36 Laporan	56.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		92.881.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2.079.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas 3. Peningka tan kesejah teraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		2.079.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	157.500.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas 3. Peningka tan kesejah teraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		165.375.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				2 Laporan	58.297.720,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		61.212.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			97 Unit	277.186.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A	-	296.947.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				53 Unit	143.580.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		160.877.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				41 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		26.798.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	108.606.000,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	ASN Dinas Sosial P3A		109.272.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	<i>Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial</i>	-			72,00 %	273.421.000,00						-	525.108.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerahkabupaten/kota</i>	-			4 kegiatan	273.421.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pekerja Sosial Masyarakat, TSKS, Karang Taruna, LK3	-	525.108.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	107.017.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, LK3		112.367.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				26 Orang	127.074.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, LK3		338.299.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				3 Lembaga	29.330.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, LK3		49.222.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			<i>Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				2 Sertifikat	10.000.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Pekerja Sosial Masyarakat, TKSK, Karang Taruna, LK3		25.220.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<i>Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</i>	-			100 %	10.000.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	<i>Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan</i>	-			10 orang	10.000.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
			<i>Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	<i>Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani</i>	-			100 %	1.765.171.010,00						-	3.408.321.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				120 Orang	190.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial		327.818.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	37.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial		40.430.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				50 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Penerima Manfaat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				140 Orang	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Penerima Manfaat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		440.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Penerima Manfaat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		140.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 Orang	82.273.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Penerima Manfaat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		225.387.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Penerima Manfaat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)		80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	<i>Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial</i>	-			80,27 %	4.007.196.860,00						-	4.670.060.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sosialisasi bantuan sosial</i>	-			26 Kecamatan	4.007.196.860,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	-	4.670.060.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>				100000 Keluarga	136.634.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		605.970.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				3000 Keluarga	3.870.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		4.064.090.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	<i>Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			100 %	711.978.720,00						-	2.061.255.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	<i>jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota</i>	-			5 kegiatan	592.732.290,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Korban bencana alam dan sosial	-	1.582.710.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				420 Orang	206.336.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Korban bencana alam dan sosial		225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				130 Orang	90.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Korban bencana alam dan sosial		101.076.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	135.160.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Korban bencana alam dan sosial		928.817.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				92 Orang	109.209.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Korban bencana alam dan sosial		218.545.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				240 Orang	51.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Korban bencana alam dan sosial		109.272.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana</i>	-			2 kegiatan	119.246.430,00			-	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas 3. Peningka tan kesejah teraan ekonomi masyarakat	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	-	478.545.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			<i>Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				6 Kampung	43.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan kapasitas p erekonomia n yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas 3. Peningka tan kesejah teraan ekonomi masyarakat	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)		218.545.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	41.068.430,00	Kab. Kebumen, Kebumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas 3. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Taman Makam Pahlawan (TMP)		43.121.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						742.784.290,00							1.005.141.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						742.784.290,00							1.005.141.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</i>	-			18,38 %	241.385.000,00						-	253.029.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			3 kegiatan	71.385.000,00				2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	26 Kecamatan dan 24 Kabupaten	-	74.954.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	71.385.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	26 Kecamatan dan 24 Kabupaten		74.954.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>'Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			2 kegiatan	170.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	kelompok/ organisasi	-	178.075.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				30 Organisasi	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	kelompok/ organisasi		178.075.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan	-			100 %	93.756.430,00						-	274.300.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			2 kegiatan	46.475.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Kekerasan Perempuan	-	48.798.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	46.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Kekerasan Perempuan		48.798.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan</i>	-			2 kegiatan	47.281.430,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Perempuan korban kekerasan	-	225.502.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>				60 Orang	7.259.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Perempuan korban kekerasan		33.702.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				6 Layanan	40.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Perempuan korban kekerasan		191.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	<i>Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga</i>	-			18,36 %	14.636.000,00						-	15.367.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			2 kegiatan	14.636.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Keluarga	-	15.367.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	14.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Keluarga		15.367.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	-			100 %	7.415.430,00						-	33.915.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	-			1 Dokumen	7.415.430,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Data Gender dan Anak	-	33.915.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Dokumen	7.415.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Data Gender dan Anak		33.915.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)</i>	-			madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA	353.945.000,00						-	371.115.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			3 kegiatan	148.795.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Pelebagaan PHA	-	151.551.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i>				52 Organisasi	93.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Pelebagaan PHA		93.665.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	55.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Pelembagaan PHA		57.886.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	-			3 kegiatan	205.150.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Pelembagaan PHA	-	219.564.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	68.732.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Pelebagaan PHA		72.168.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	84.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Pelebagaan PHA		93.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	51.806.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Pelebagaan PHA		54.396.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Anak	-			100 %	31.646.430,00						-	57.415.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus</i>	-			1 kegiatan	31.646.430,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Layanan bagi anak	-	57.415.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				50 Orang	31.646.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningka tan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	Layanan bagi anak		57.415.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
J U M L A H								12.205.300.592,00							16.734.625.000,00	

Rencana Kerja Dan Pendanaan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah tahun anggaran 2025 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				14.337.261.302			15.868.170.000
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.729.349.142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.104.209.000
1	06	01	2,01		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	8 dokumen	113.572.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	8 dokumen	155.258.000
1	06	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12 bulan	3.670.434.702	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	3.907.783.000
1	06	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	52 orang	80.836.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	33 orang	90.791.000
1	06	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah bulan penyediaan administrasi umum PD	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12 bulan	194.542.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	252.896.000
1	06	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	6 unit	154.901.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3 unit	118.041.000
1	06	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	12 bulan	217.876.720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 bulan	282.493.000
1	06	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan,	97 unit	297.186.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	96 unit	296.947.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Daerah	urusan pemerintahan daerah	Semua Kel/Des						
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	persentase peningkatan sdm kesejahteraan sosial		72%	188.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		73%	525.108.000
1	06	02	2,03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	4 kegiatan	188.372.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 kegiatan	525.108.000
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		100%	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	20.000.000
1	06	03	2,01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	jumlah migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	10 orang	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 orang	20.000.000
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	presentase PMKS di luar panti kewenangan kabupaten yang tertangani		100%	4.695.171.010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SPM Sosial	100%	3.417.503.000
1	06	04	2,01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	jumlah PMKS terlantar di luar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2306 orang	4.187.897.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SPM Sosial	1.950 orang	2.512.116.000
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	jumlah kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	5 kegiatan	507.273.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 kegiatan	905.387.000
1	06	05			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan jaminan sosial		80,27%	4.007.196.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		81,78%	4.670.060.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026		
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	06	05	2,02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi bantuan sosial	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	26 kecamatan	4.007.196.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		26 kecamatan	4.670.060.000
1	06	06			Program Penanganan Bencana	prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota		100%	671.103.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SPM Sosial	100%	2.061.255.000
1	06	06	2,01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan perlindungan sosial morban bencana alam dan sosial kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	5 kegiatan	571.857.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	SPM Sosial	5 kegiatan	1.582.710.000
1	06	06	2,02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	99.246.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	478.545.000
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	persentase TMP yang dikelola		100%	41.068.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	70.035.000
1	06	07	2,01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	presentase tmp yang di kelola	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	100%	41.068.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	70.035.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				972.784.290	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1.005.141.000
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				972.784.290				1.005.141.000
2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		18,38%	471.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19.73%	253.029.000
2	08	02	2,01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	jumlah keg pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/koyta	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3 kegiatan	71.385.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	74.954.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
					Kabupaten/Kota								
2	08	02	2,02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	178.075.000
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	cakupan perlindungan perempuan		100%	93.756.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	274.300.000
2	08	03	2,01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	46.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	48.798.000
2	08	03	2,02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	47.281.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	225.502.000
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	cakupan program peningkatan kualitas keluarga		18,36%	14.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		19,72%	15.367.000
2	08	04	2,01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	2 kegiatan	14.636.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	15.367.000
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan program peningkatan kualitas keluarga		100%	7.415.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	33.915.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program/kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju rencana tahun 2026	
							Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	05	2,01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen pengumpulan, pengelohan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1 dokumen	7.415.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	33.915.000
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)		madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA	353.945.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		madya pratama atau madya atau nindya atau utama atau KLA	371.115.000
2	08	06	2,01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pelebagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3 kegiatan	148.795.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	151.551.000
2	08	06	2,02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	3 kegiatan	205.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	219.564.000
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perlindungan Anak		100%	31.646.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	57.415.000
2	08	07	2,02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	1 kegiatan	31.646.430	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	57.415.000
Total									15.310.045.592				16.873.311.000

Sumber: SIPD-RI Kemendagri, 2025



FORUM PERANGKAT DAERAH DINSOS P3A 2024 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA PD 2025

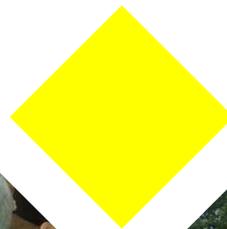
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Kebumen, 20 Februari 2024





1. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RAPERDA Tentang RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisai Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
9. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 007.2.5/178 tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Alokasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025 Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial P3A memunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah



Penyusunan rencana dan program di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



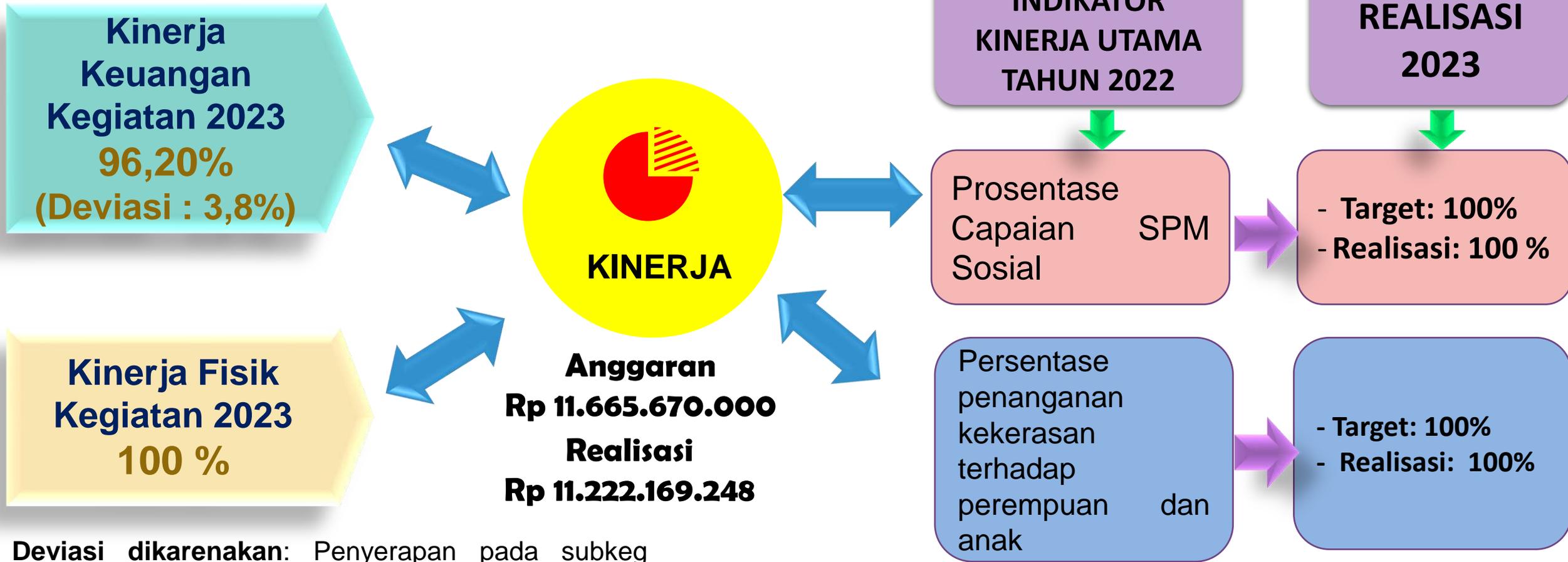
Perumusan kebijakan dibidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Perbub no 116 Tahun 2021



Pelaksanaan koordinasi di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Evaluasi Kinerja Tahun 2023



Deviasi dikarenakan: Penyerapan pada subkeg penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak maksimal karena adanya subkoor/JF dan staf yg purna tugas dan sampai sekarang belum terisi (subkoor 5, staf pensiun 1)

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Urusan Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pely dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pely dasar

Urusan P3A

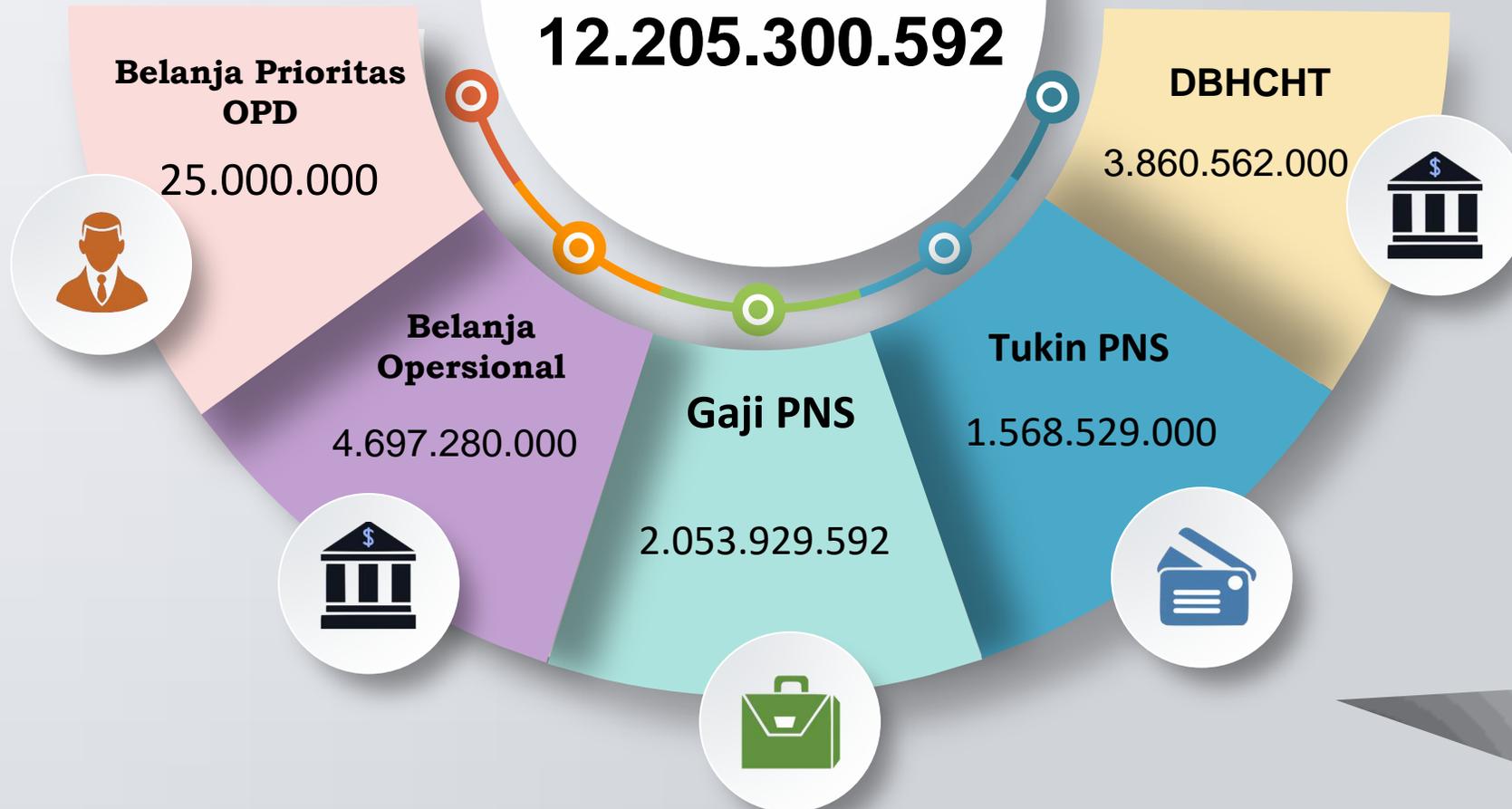
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosia
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Program Rehabilitasi Sosial
5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
6. Program Penanganan Bencana
7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program Perlindungan Khusus Anak

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD

No	Indikator	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prosentase Capaian Sosial SPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Prosentase penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pagu Indikatif TA 2025 12.205.300.592



RENCANA KERJA 2025



2 URUSAN



13 PROGRAM



24 KEGIATAN



58 SUB KEGIATAN



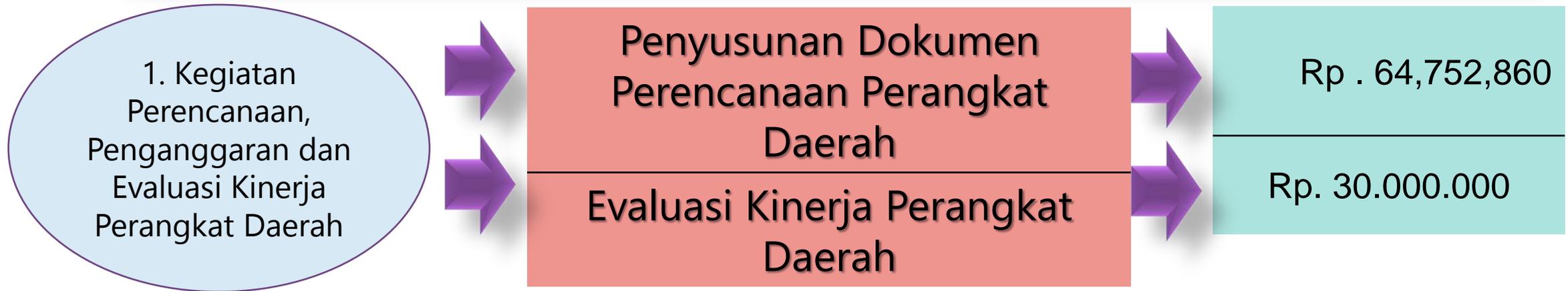
No	Program	Pagu Indikatif (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.653.680.282
2	Program Pemberdayaan Sosial	273.421.000
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	10.000.000
4	Program Rehabilitasi Sosial	1.765.171.010
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.007.196.860
6	Program Penanganan Bencana	711.978.720
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	41.068.430
8	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	241.385.000
9	Program Perlindungan Perempuan	93.756.430
10	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	14.636.000
11	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7.415.430
12	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	353.945.000
13	Program Program Perlindungan Khusus Anak	31.646.430
	Jumlah	12.205.300.592

RENCANA PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Dinsos P3A

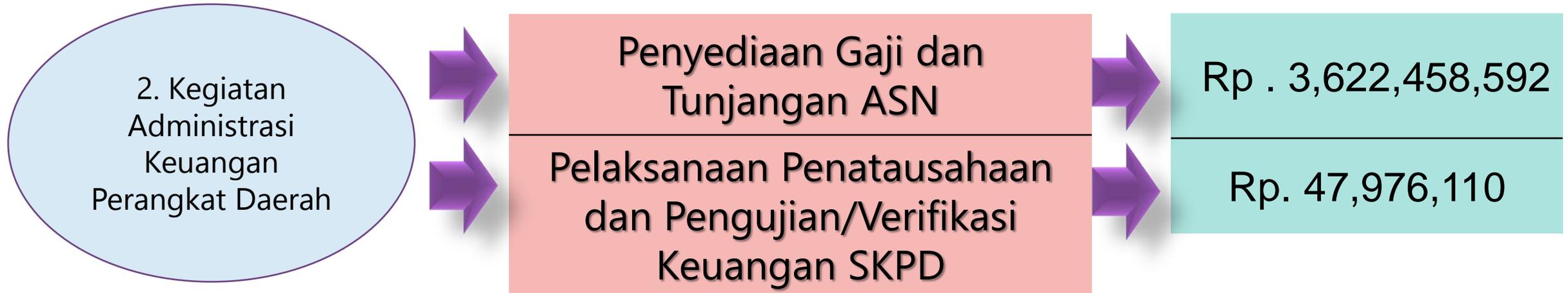


1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH = Rp 4.653.680.282



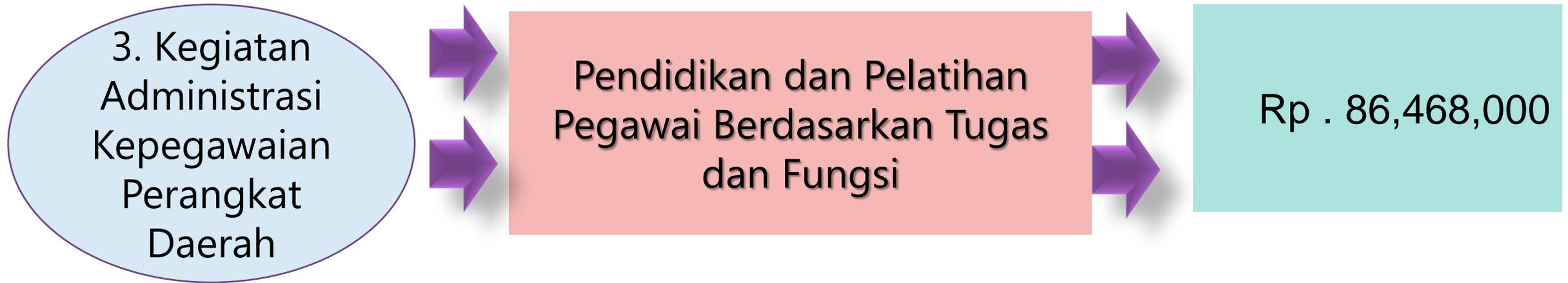
OUTPUT

5 Dokumen (Renja, rka, dpa, rkap, dppa)
3 Dokumen (lkipj, lppd, lkjip)



OUTPUT

32 Orang/bulan;
8 Dok spp ls/ tu/ gu, dok spm ls/tu/ gu, lap fungsional, lap keu , rekonsiliasi kas,
lap adm, lap bku, lap pajak ,



Peningkatan kapasitas SDM pada DINSOS P3A (50 Orang)

4. Kegiatan
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rp 9.000.000

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Rp 50.000.000

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Rp 27.542.000

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rp 3.500.000

5. Penyediaan Bahan/Material

Rp 38.000.000

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rp 56.500.000

7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Rp 10.000.000

OUTPUT

2 paket; 2 paket; 2 paket; 2 dokumen; 4 paket; 36 laporan; 2 dokumen

5. Kegiatan
Pengadaan barang
milik daerah
penunjang urusan
pemerintahan
daerah

Pengadaan peralatan
dan mesin lainnya

Rp . 112.420.000

OUTPUT

6 unit (TV LCD, Leptop, printer)

6. Kegiatan
Penyediaan jasa
penunjang urusan
pemerintah daerah

**Penyediaan jasa surat
menyurat**

Rp . 2.079.000

Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik

Rp. 157,500,000

Penyediaan jasa pelayanan
umum kantor

Rp. 58,297,720

OUTPUT

2 laporan; 12 laporan; 2 laporan

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Rp. 143.580.000

Rp. 25.000.000

Rp. 108.606.000

OUTPUT

53 unit; 41 unit; 3 unit

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

= Rp 273.421.000,-

1.
Pengembangan
potensi sumber
kesejahteraan
sosial daerah
kabupaten/kota

1. Peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota

2. Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kab/kota

3. Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kab/kota

4. Peningkatan kemampuan SDM dan penguatan LK3

Rp. 107,017,000

Rp. 127.074.000

Rp. 29,330,000

Rp 10.000.000

OUTPUT

100 orang SDM Kesos;
26 orang TKSK;
3 lembaga Karangtaruna; 2 sertifikat hasil LK3

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

= Rp 10.000.000, -

1. Kegiatan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kab/kota untuk dipulangkan ke desa/kel asal

Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kab/kota untuk dipulangkan ke desa/kel asal

Rp . 10.000.000

OUTPUT

10 orang migran

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL = Rp 1.765.171.010

Keg. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Penyediaan Permakanan	844,145,000
penyediaan sandang	100,000,000
Penyediaan Alat Bantu	66,752,860
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	190,000,000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	37,000,000
Pemberian Layanan Kedaruratan	20,000,000

OUTPUT

Peny. permakanan 520 org, peny. sandang 270 org, peny. Alat bantu 62 org, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesejatan dasar 120 org, pemberian layanan data pengaduan 50 org, dan pembarian layanan kedaruratan 50 org;



LANJUTAN.....

Keg. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	20,000,000
Penyediaan Permakanan	275,000,000
Penyediaan Sandang	90,000,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	82,273,150
kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabsos	40,000,000



OUTPUT

Pemberian lay. Data dan pengaduan 50 org, peny permakanan 140 org, peny. Sandang 100 org, pemberian bimsik mental spiritual dan sosial 100 org; acara HDI

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL: Rp 4.007.196.860

Keg. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	136,634,860
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3,870,562,000

OUTPUT

100.000 keluarga yg mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin; 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; Bansos DBHCHT;



6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA: Rp 711.978.720

Keg. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanan	206,336,000
Penyediaan Sandang	90,760,000
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	135,160,860
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	109,209,430
Pelayanan Dukungan Psikososial	51,266,000

Keg. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	43,028,000
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	76,218,430.

OUTPUT

480 org yg mendapatkan permakanan; 130 org mendapatkan sandang; 1 unit tempat penampungan pengungsi; 92 org mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan; 240 orang mendapatkan layanan dukungan psikososial



6 kampung siaga bencana;
60 org TAGANA;



7. PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN: Rp 41,068,430

Keg. Pemeliharaan Taman makam pahlawan nasional kab/kota

Pengamanan taman makam pahlawan nasional kab/kota	41,068,430
---	------------

OUTPUT

Pengamanan TMP, Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan

**8. Prog. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan:
Rp 241.385.000**

Keg. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

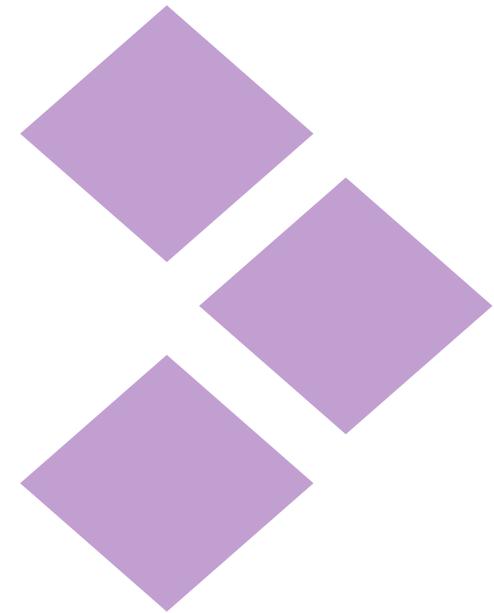
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	71,385,000
---	------------

Keg. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	170,000,000
--	-------------



52 perangkat daerah yg mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG; Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 30 organisasi



9. PROG. PERLINDUNGAN PEREMPUAN: Rp 93.756.430

Keg. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	46,475,000
---	------------

Keg. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	7,259,430
---	-----------

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	40,022,000
---	------------

OUTPUT

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 dokumen; Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 60 orang; Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 6 layanan

10. Prog. Peningkatan kualitas keluarga: Rp. 14,636,000	
Keg. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten/Kota	14,636,000



Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kabupaten/Kota 1 dokumen



11. PROG. PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK: Rp 7,415,430

Keg. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	7,415,430
--	-----------

OUTPUT

Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia 1 dokumen Kabupaten/Kota



12. PROG. PEMENUHAN HAK ANAK (PHA): Rp 353.945.000

Keg. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	93,665,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	55,130,000

OUTPUT

Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 52 organisasi; Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 dokumen

Lanjutan

Keg. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,732,000
--	------------

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84,612,000
---	------------

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51,806,000
---	------------

OUTPUT

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 dokumen; Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 dok; Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 dok



13. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK: Rp 31.646.430

Keg. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

31,646,430

OUTPUT

Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 50 orang





BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TERIMA KASIH



DINSOS PBA
Peduli, Melayani, Sejahtera

DOKUMENTASI FORUM PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL P3A KAB.
KEBUMEN TAHUN 2024 DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025









UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

DAN HARI LINGKARAN HIDUP DUNIA

Selesakan Kurikulum dengan Inovasi dan Prinsip "Belajar dan Berkembang"

2024



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2024**